



FKPKN

**FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

Tsiarulan!

2023

KATA PENGANTAR



BURHANI AS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dapat menyusun Laporan kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) secara tepat waktu.

Laporan kegiatan FKPKN ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Treasury, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada Satuan Kerja mitra Kanwil DJPb, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi dan unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana untuk menyediakan informasi kegiatan-kegiatan terkait fiskal dan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 11 April 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS



Pengarah

Burhani AS

Ketua

Fauzi Syafriel

Penyusun

Agung Richardus Kunarjo

Bernand Situmorang

Lilik Kurniawan

Rr. Raina Avissa Dione Belindasari

Agatha Early Ameliana

DAFTAR ISI

i	Kata Pengantar
ii	Tim Penyusun
iii	Daftar Isi
iv	<i>Executive Summary</i>
1	Latar Belakang
2	Identifikasi Masalah
4	Pelaksanaan Kegiatan Periodik
34	Pelaksanaan Kegiatan Strategis/Tematik
68	Pelaksanaan Kegiatan <i>Local Expert</i>
71	Kesimpulan dan Rekomendasi

EXECUTIVE SUMMARY

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) tingkat daerah secara aktif berkolaborasi dan bersinergi baik dengan Kemenkeu Satu, berbagai tim/forum daerah, pimpinan pemerintah daerah, dan *local expert* melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta arahan dan rekomendasi sebagai wujud peran Kanwil DJPb dalam membantu penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat terhadap masyarakat.

Selama periode triwulan I tahun 2023, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan sebanyak 21 kegiatan periodik, 24 kegiatan strategis/tematik yang terdiri atas 14 kegiatan strategis dan 10 kegiatan tematik, serta 1 kegiatan yang melibatkan *local expert* dengan rincian sebagai berikut.

1. Kegiatan Periodik

Kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi maupun unit vertikal yang telah dilaksanakan diantaranya Pembinaan Satker dalam Rangka Penyelesaian *To-Do-List* pada Universitas Jambi dan RS. Dr. Bratanata, Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam lingkup 5 (lima) KPPN di Provinsi Jambi, Pelaksanaan Kelas Bahasa Penyelesaian dan Pembayaran Tagihan oleh KPPN Jambi, Koordinasi Pembinaan UMKM oleh KPPN Kuala Tungkal, Monitoring dan Evaluasi PNBPN Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Konfirmasi Status Piutang Negara Pada KLP Singkut/KUD Putra Tama, Kegiatan Senam Bersama, Bazar UMKM, dan Bakti Sosial dalam Rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023 KPPN Kuala Tungkal, Penyelenggaraan Pekan UMKM Kemenkeu Satu, Sosialisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 oleh KPPN Kuala Tungkal, Koordinasi Pelaksanaan Asistensi BLUD Tahun 2023 bersama dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, serta Rangkaian Rapat ALCo Regional *Deputies* dan Komite periode Januari dan Februari tahun 2023.

2. Kegiatan Strategis/Tematik

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai upaya untuk menunjang bahasan tematik Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional diantaranya Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa dan Penggunaan Data P3KE, *Sharing Session* Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah Lingkup Kabupaten Merangin dan Sarolangun, *Focus Group Discussion* (FGD) Penyaluran BOK Puskesmas Tahun 2023 oleh KPPN Bangko, Diskusi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bersama Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Diskusi Temuan LKPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Bersama BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rapat Koordinasi “Sinergi Mendukung Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas, dan Transparansi LKPD”, serta Pemetaan dan Analisis Kondisi Kemiskinan Desa Tertinggal pada Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Sementara itu, kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan keterlibatan berbagai tim atau forum daerah diantaranya *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rapat Kerja Daerah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Forum Ekonomi dan Bisnis Jambi. Di samping itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan pimpinan daerah wilayah Provinsi Jambi diantaranya dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Kepala OJK Jambi, Kepala BPKP Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BI Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, serta Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi.

3. Kegiatan Local Expert

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan *local expert* Provinsi Jambi berupa *Talkshow* APBN yang mengusung tema Kinerja Baik APBN 2022, Memperkuat Optimisme dan Kewaspadaan di Tahun 2023.



FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

LATAR BELAKANG

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

LATAR BELAKANG

Tahun 2023, merupakan tahun keempat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ekonomi global dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah serius. Kekhawatiran akan resesi merebak seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meroketnya inflasi di berbagai negara, dan peningkatan suku bunga global. Padahal, sampai dengan tahun 2022 ini luka-luka pandemi belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi.

Tahun ini penuh tantangan dalam mengelola keuangan negara karena masih dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 dan isu geopolitik serta menjadi tahun dimana batas maksimal defisit anggaran kembali ke angka 3%. Untuk menghadapi hal tersebut, pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, terkait penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), seluruh elemennya pada tahun ini disalurkan melalui KPPN di daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat tahun sebelumnya, tidak seluruh elemen TKD disalurkan KPPN di daerah.

Keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) walaupun belum lama keberadaannya, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Adapun dana APBN yang dikelola di wilayah Jambi mencapai Rp20,49 Triliun, yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp6,57 Triliun dan TKD sebesar Rp13,92 Triliun. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya FKPKN, kesadaran untuk bersinergi semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan antusiasme terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPKN.

Permasalahan yang berulang setiap tahun anggaran masih saja terjadi. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang belum berkualitas. Dengan sinergi dan berkolaborasi, diharapkan semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara mampu menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu pembangunan regional. Tidak terbatas pada pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun juga dapat memberikan dukungan nyata di level ekonomi regional kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menumpuknya pencairan dana di akhir tahun masih saja terjadi walaupun intensitasnya semakin menurun. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian pimpinan sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan pelaksanaan anggaran terus menerus diadakan sejak triwulan I dalam rangka edukasi dengan harapan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan anggaran.

Dari berbagai dinamika dalam pengelolaan fiskal di daerah dan pengelolaan keuangan negara di daerah pada khususnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sinergi antar unit terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kualitas yang lebih baik.

FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

IDENTIFIKASI MASALAH

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

IDENTIFIKASI MASALAH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Treasury, Regional Chief Economist (RCE)*, dan *Financial Advisor* dalam Triwulan I tahun 2023 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. Akselerasi penyaluran TKD merupakan tantangan tersendiri mengingat mulai tahun 2023, semua elemen TKD disalurkan melalui KPPN di daerah.
2. Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.
3. Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan ditingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) maupun Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
5. Penguatan dan Kerjasama dengan pihak Eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi.
6. Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.

Adapun terkait isu/permasalahan yang ada di Kanwil DJPb Jambi dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Isu/Permasalahan	Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut/ Kanwil DJPb/ Kanwil Kemenkeu
1.	Perlunya untuk meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD seperti Bimbingan Laporan Keuangan, Pembinaan Satker, Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran, <i>Sharing Session</i> Pengelolaan Keuangan Tingkat Pusat dan Daerah, Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa dan Penggunaan Data P3KE, Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa dan Penggunaan Data P3KE.
2.	Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi seperti Pekan UMKM Kemenkeu Satu dan Koordinasi Pembinaan UMKM.
3.	Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompetensi	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk

	pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.	meningkatkan penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu seperti Rapat ALCO Regional Tingkat Teknis, Deputies dan Komite setiap bulannya.
4.	Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan ditingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) maupun Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan seperti Bimbingan laporan keuangan, Monitoring dan Evaluasi PNB, Diskusi Sistem Akuntansi dan Daerah bersama BPKP, Diskusi Temuan LKPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Bersama BPK, Rapat Koordinasi “Sinergi Mendukung Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas, dan Transparansi LKPD.
5.	Penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (<i>local expert</i>) di wilayah Provinsi Jambi.	Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti mengundang <i>local expert</i> pada acara <i>talkshow</i> atau <i>press release</i> terkait kinerja APBN
6.	Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi dan menciptakan pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.	Kepala Kanwil beserta jajarannya berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Forum Ekonomi dan Bisnis Jambi, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Provinsi Jambi
7.	Peran sebagai <i>Financial Advisor</i> adalah peran strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dan mewujudkan BLU yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada efisiensi dan produktivitas. Sehingga koordinasi dan pendampingan terhadap satuan kerja terkait perlu dilaksanakan dari <i>high level</i> hingga tingkat teknis.	Kepala Kanwil beserta jajarannya berkoordinasi aktif dengan satuan kerja seperti BPK Perwakilan Jambi, Pengadilan Tinggi, Polda, RS Bhayangkara, Korem 042 Garuda Putih, dan RS Bratanata.
8.	Perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah/ Pimpinan Lembaga terkait supaya peran Kanwil sebagai <i>Treasury. Financial Advisor</i> , dan <i>Regional Chief Economist</i> dapat memberi dampak bagi masyarakat seperti pemulihan ekonomi dimana APBN yang memiliki peran dalam memantik pertumbuhan ekonomi.	Kepala Kanwil berkoordinasi aktif dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala BI Jambi, Kepala OJK Jambi, Kepala BPK Jambi dan Kepala BPKP Jambi dalam melaksanakan peran sebagai Perwakilan Kemenkeu di Jambi.



FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

1. PEMBINAAN SATKER RS Dr. BRATANATA DALAM RANGKA PENYELESAIAN *TO DO LIST*

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Januari 2023 pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB bertempat di RS Dr. Bratanata.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Jambi, dengan operator SAKTI dari RS Dr. Bratanata.

c. Rincian Kegiatan

Pembinaan Satker RS Dr. Bratanata dilakukan dalam rangka penyelesaian *To Do List*. Satker tersebut terpilih karena memiliki permasalahan paling kompleks sehingga perlu dilakukan pembimbingan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022.

Berdasarkan monitoring aplikasi MonSAKTI pada tanggal 6 Januari 2023, ditemukan bahwa RS Dr. Bratanata memiliki sebanyak 8.744 permasalahan *To Do List* terkait dengan pendetilan persediaan.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terjadi disebabkan karena pada periode Semester I satker diarahkan oleh kantor pusat untuk melakukan tutup buku periode Semester I tanpa melakukan pendetilan persediaan. Oleh karena itu, satker mengira bahwa pendetilan persediaan tidak perlu dilakukan lagi.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kabid PAPK memberikan arahan sebagai berikut:
 - a. KPPN Jambi agar menambahkan 2 *role* operator SAKTI untuk modul persediaan.

- b. Penyelesaian pendetilan persediaan Semester I diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 16 Januari 2023, mengingat tenggat waktu penyusunan LK UAPPA-W Tahunan adalah tanggal 20 Januari 2023.
 - c. Apabila sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 pendetilan persediaan belum selesai, Kanwil bersama dengan KPPN Jambi akan membantu pendetilan dengan mengirimkan *trainer* SAKTI.
- 3) Atas usulan tersebut, satker RS Dr. Bratanata setuju dan akan mengupayakan pendetilan persediaan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kanwil DJPb Jambi.

2. EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA, DAN KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan evaluasi dan koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Merangin.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Bangko serta staf penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan juga Kepala BPKAD Kabupaten Merangin serta staf penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan koordinasi dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Merangin dan Pemda Kabupaten Sarolangun dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2022 dan juga terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan diskusi yang membahas mengenai penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, dan Nonfisik serta disampaikan pula beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran TKDD.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I TA. 2023, belum dapat dilakukan penyaluran dikarenakan DIPA masih dalam proses reviu oleh Itjen Kemenkeu.
- 2) Berdasarkan keterangan dari BPKAD Kabupaten Merangin terdapat kendala yang dihadapi dalam penyaluran TKDD berdasarkan tren 2022, yaitu:
 - a) Lambatnya penyampaian laporan penyaluran Dana Desa oleh desa yang dapat menghambat percepatan penyaluran Dana Desa.
 - b) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh OPD pengampu DAK Fisik yang mendekati batas waktu.
- 3) Pada kegiatan ini juga diinformasikan terkait pembukaan *trigger input* SP2D BUD TA. 2022 dan pengisian capaian output penyaluran DAK Fisik TA. 2022.
- 4) BPKAD Kabupaten Merangin memberi usulan antara lain:
 - a) Membuat FGD Penyaluran TKDD yang melibatkan KPPN, BPKAD dengan OPD pengampu DAK Fisik, DPMD dan juga Kepala Desa.
 - b) Membuat *WhatsApp Group* terkait TKDD antara Pemda Kabupaten Merangin dan Pemda Kabupaten Sarolangun agar terciptanya motivasi dan semangat bersaing antar kabupaten guna terciptanya percepatan penyaluran TKDD.
- 5) Pada penyaluran DAK Nonfisik BOK Puskesmas, terdapat penambahan 2 desa baru di Kabupaten Merangin, dan kerja sama inisiasi forum pengelolaan keuangan daerah bersama antara KPPN, BPKAD dan BAPPEDA.

3. PEMBINAAN SATKER UNIVERSITAS JAMBI DALAM RANGKA PENYELESAIAN *TO DO LIST*

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Januari 2023 pukul 09.00 s.d. 11.30 WIB bertempat di Universitas Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Jambi, dengan operator modul komitmen, aset tetap, persediaan dan bagian perencanaan Universitas Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Pembinaan Satker Universitas Jambi dilakukan dalam rangka penyelesaian *To Do List* terutama terkait dengan pendetilan persediaan. Satker tersebut terpilih karena memiliki permasalahan aset dan persediaan terbanyak kedua setelah satker RS Dr. Bratanata.

Berdasarkan monitoring aplikasi MonSAKTI pada tanggal 13 Januari 2023, ditemukan bahwa Universitas Jambi memiliki sebanyak 56 permasalahan *To Do List* terkait dengan persediaan yang belum didetulkan, 316 permasalahan *To Do List* terkait dengan ketidaksesuaian kode akun VS kode BMN, 2.109 permasalahan

To Do List terkait dengan aset yang belum dilakukan validasi dan *approve*, dan 11 permasalahan *To Do List* terkait dengan persediaan yang belum di-*approve*.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Permasalahan *To Do List* Universitas Jambi terjadi karena:
 - a. Terdapat kesalahan pencatatan pada modul komitmen sehingga *validator* dan *approver* masih ragu untuk melakukan validasi dan *approval*. Kesalahan ini terjadi karena pengisian modul komitmen dilakukan oleh masing-masing operator pada fakultas. Berdasarkan keterangan, saat ini terdapat sebanyak 11 operator modul komitmen pada Universitas Jambi. Sehingga, *validator* dan *approver* sampai saat ini masih mengoreksi kebenaran pencatatan aset tetap.
 - b. Operator modul aset tetap dan persediaan tidak memiliki data lengkap terkait dengan masing-masing barang pada modul komitmen, sehingga kode barang saat pendetilan ditentukan sendiri oleh operator.
 - c. Terdapat pekerjaan dalam bentuk paket, tetapi dipecah-pecah dalam modul komitmen. Sedangkan, dalam satu paket pekerjaan, terdapat barang yang nilainya di bawah kapitalisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai belanja modal gedung dan bangunan, ataupun belanja modal peralatan dan mesin. Hal ini mengakibatkan terdeteksinya ketidaksesuaian kode akun dengan kode barang.
 - d. Terdapat BMN yang belum resmi milik Universitas Jambi tetapi sudah dilakukan renovasi.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kabid PAPK bersama dengan *trainer* SAKTI KPPN Jambi memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Operator modul aset tetap, persediaan serta bagian perencanaan agar meningkatkan komunikasi dengan operator modul komitmen sehingga terjadi keselarasan pemahaman dan menghindari kesalahan pencatatan pada tahun 2023.

- b. Terkait dengan kesalahan akun, agar dipisahkan antara akun yang memerlukan Koreksi SPM dan revisi DIPA dengan akun yang tidak perlu dilakukan revisi. Universitas Jambi diberikan waktu hingga 18 Januari 2023 untuk melakukan revisi sebagaimana disampaikan dalam Lampiran III Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1/PB/PB.6/2023. Apabila sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 pendetilan persediaan belum selesai, Kanwil bersama dengan KPPN Jambi akan membantu pendetilan dengan mengirimkan *trainer* SAKTI.
 - c. Setiap pekerjaan dalam bentuk paket tidak perlu dipecah pendetailannya dalam modul komitmen agar tidak terdeteksi sebagai ketidaksesuaian kode akun dengan kode barang.
 - d. BMN yang bukan milik Universitas Jambi tetapi sudah dilakukan renovasi agar diungkapkan dalam CaLK.
- 3) Universitas Jambi telah memiliki rencana aksi untuk tahun 2023 demi mencegah permasalahan kembali terjadi.

4. SOSIALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2023 LINGKUP KPPN JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB bertempat di Aula KPPN Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Jambi, dan Satuan Kerja lingkup KPPN Jambi

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan dari Kepala KPPN Jambi yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Di tahun 2022, total transaksi dengan KKP di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi mencapai Rp13,41 miliar dan diharapkan tahun 2023 dapat ditingkatkan dan dioptimalkan penggunaannya.

Setelahnya, disampaikan materi mengenai Langkah – Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bansos dan banper, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Sesuai dengan *Early Warning* Semester 1 TA 2023 berdasarkan hasil RPA Wilayah Semester I Tahun 2022 beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Satker di Januari 2023 adalah dengan melakukan revisi Hal III DIPA, segera mengajukan

UP sesuai dengan kebutuhan, segera membuat kontrak untuk belanja yang membutuhkan kontrak dan segera mendaftarkan ke KPPN, serta membuat *mapping* output yang diperlukan.

Dalam penyampaian Strategi Pencapaian Nilai IKPA dijelaskan mengenai pengertian IKPA, aspek, indikator, dan kategori nilai IKPA. Dari 8 indikator IKPA, terdapat 3 indikator yang capaiannya belum optimal, yaitu Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Satker memahami pelaksanaan dan penggunaan KKP Domestik sehingga salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan ialah dengan mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
- 2) Satker dapat melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran lebih dini di awal tahun anggaran
- 3) Dengan *earlu warning* yang disampaikan, diharapkan satker dapat meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terutama pada indikator deviasi hal III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.

5. SOSIALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2023 LINGKUP KPPN KUALA TUNGKAL

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB yang bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Kuala Tungkal, dan Satuan Kerja lingkup KPPN Kuala Tungkal.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal dan dilanjutkan dengan penganugerahan TANGGUH Awards 2022

sebagai bentuk apresiasi kepada satker dengan nilai IKPA terbaik Triwulan IV tahun 2022.

Kegiatan dilaksanakan dengan pemberian materi dan diskusi terkait optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah, *early warning* Semester I Tahun 2023 satker lingkup KPPN Kuala Tungkal, evaluasi capaian IKPA 2022 dan strategi optimalisasi nilai IKPA satker-satker lingkup KPPN Kuala Tungkal, serta langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 antara lain kualitas belanja, akselerasi pelaksanaan kegiatan, percepatan pengadaan barang dan jasa, akurasi penyaluran bansos dan banper, meningkatkan kualitas belanja, serta monitoring dan evaluasi sebagai *early warning*.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Untuk sarana pendukung percepatan pelaksanaan anggaran, KPPN Kuala Tungkal bersama dengan Bank BRI akan memonitoring dan menindaklanjuti pengajuan KKP Reguler atau KKP Domestik sebagai alat pembayaran satuan kerja yang membebani DIPA, sehingga diharapkan seluruh satuan kerja dapat segera menyampaikan persyaratan pengajuan KKP kepada Bank BRI.
- 2) Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Kuala Tungkal akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian IKPA pada tahun 2023 dan penggunaan KKP oleh satker. Diharapkan materi mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran yang sudah disampaikan dapat dilaksanakan oleh seluruh satker lingkup KPPN Kuala Tungkal.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahun 2022 dijadikan *early warning* semester I tahun 2023, sehingga diharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2023 semakin baik.

6. SOSIALISASI IKPA 2023 PADA KPPN MUARA BUNGO

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dilaksanakan pada Kamis, tanggal 19 Januari 2023 yang dimulai pada pukul 08.30 WIB dan bertempat di Aula KPPN Muara Bungo.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Muara Bungo, dan peserta undangan yang hadir sebanyak 35 orang dari 53 satuan kerja mitra KPPN Muara Bungo.

c. Rincian Kegiatan

Sosialisasi diawali dengan pembukaan dari pembawa acara, pembacaan doa, dan sambutan sekaligus *keynote speech* pelaksanaan anggaran oleh Kepala KPPN Muara Bungo.

Kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi terkait *early warning* pelaksanaan anggaran 2023 yang mencakup beberapa hal antara lain potensi adanya kebijakan *Auto Adjustment* (AA), belum komprehensifnya pemahaman terkait revisi DIPA, potensi deviasi RPD hal III DIPA karena target belanja semester satu sebesar 75% pada Kementerian Agama, perubahan pejabat perbendaharaan di satker dan/atau panitia pengadaan barang/jasa, keterbatasan pejabat bersertifikasi di daerah, penambahan pagu di akhir triwulan, penambahan/pengurangan pegawai maupun kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tidak dapat diprediksi sehingga menyulitkan proses revisi hal III DIPA, potensi rencana pengadaan belanja modal yang masih menunggu proses tayang di e-Katalog LKPP dan pemilihan penyedia barang/jasa, pengajuan tagihan lebih dari 17 hari kerja setelah BAST, tantangan penggunaan KKP dan KKP digital yang akan digalakkan di tahun 2023, aktivasi KKP, CMS VA yang belum tuntas, kebijakan unsur TKDN pada SAKTI, dan kebijakan penggunaan Digital Signature tersertifikasi pada SAKTI.

Selanjutnya, disampaikan materi mengenai arah kebijakan IKPA Tahun 2023 dan langkah – langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 diantaranya dengan melakukan revisi hal III DIPA, segera melakukan pengajuan UP sesuai kebutuhan dan kemampuan belanja satker dalam mencukupi untuk operasional dalam 1 bulan, segera melaksanakan perikatan kontrak, dan menentukan proyeksi capaian output bulanan sesuai dengan karakteristik output masing-masing rincian output.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan sosialisasi IKPA yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada Capaian IKPA KPPN Muara Bungo dalam hal pelaksanaan anggaran, diantaranya:
 - a. Peningkatan kepatuhan terhadap RPD hal III DIPA yang masih relatif rendah
 - b. Pengisian capaian output yang masih belum sesuai kenyataan lapangan
 - c. Kepatuhan terhadap kontrak yang masih harus lebih ditingkatkan
 - d. Kepatuhan dalam UP/TUP yang harus lebih bisa dimaksimalkan
 - e. Kurangnya koordinasi dan konsultasi pada saat proses revisi sehingga proses revisi sering tertolak atau tidak sesuai dengan batas waktu dan ketentuan
- 2) Satker lingkup KPPN Muara Bungo akan berusaha maksimal dalam menerapkan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran
- 3) Satker lingkup KPPN Muara Bungo akan melakukan revisi hal III DIPA sesuai jadwal yang ditentukan dengan lebih maksimal lagi dengan melakukan proyeksi realisasi sesuai rencana yang ada pada Hal III DIPA
- 4) Koordinasi antara KPPN Muara Bungo akan ditingkatkan, khususnya terkait pelaporan rencana capaian output sebagai rencana kegiatan agar tepat dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan

5) Perlu dilakukan *reminder* untuk Satker terhadap batasan pengajuan revisi Hal III DIPA dan batasan pelaporan rencana output tiap triwulannya serta pelaporan capaian output tiap bulannya

7. SOSIALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2023 LINGKUP KPPN BANGKO

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023 bertempat di Aula KPPN Bangko.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Bangko, dan Satuan Kerja lingkup KPPN Kuala Tungkal.

c. Rincian Kegiatan

Sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Bangko dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh tim Kanwil DJPb Provinsi Jambi terkait Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, evaluasi capaian IKPA 2022 dan strategi optimalisasi nilai IKPA.

Evaluasi dari 3 tahun terakhir, perkembangan di triwulan I ini masih lambat dan masih di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan percepatan realisasi. Selain melakukan percepatan, satker juga diminta untuk mendorong peningkatan kualitas dari belanja pemerintah dengan tepat guna untuk mendorong target program pemerintah.

Evaluasi penting dari tahun 2022 adalah masih kurangnya perhatian satker pada 2 aspek penting dari penilaian IKPA yaitu pada aspek perencanaan khususnya pada RPD halaman III DIPA dan aspek hasil yaitu capaian output.





d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Masih terdapat satker yang selama ini tidak memahami bahwa formulasi IKPA pada prinsipnya sangat terkait dengan pola perilaku satker dalam mengelola anggaran. Sehingga kegiatan sosialisasi ini sekaligus sebagai *reminder* bahwa ada hal-hal yang selama ini dilakukan dan ternyata mengurangi kualitas pelaksanaan anggaran di satker tersebut
2. Masih terdapat pejabat terkait yang kurang *aware* terhadap tanggung jawabnya dalam pengelolaan anggaran sehingga hanya bergantung pada apa yang diberikan oleh operator saja
3. Kegiatan ini kedepannya diharapkan dapat dilakukan lebih rutin dan dapat difokuskan pada *audience* yang lebih spesifik, misalnya untuk PPK dan Bendahara tersendiri supaya lebih optimal.

8. PELAKSANAAN KELAS BAHASA PENYELESAIAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 bertempat di Aula Lantai II KPPN Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan KPPN Jambi bersama dengan para satker lingkup wilayah kerja KPPN Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kelas BAHASA merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Para satuan kerja yang menjadi peserta kegiatan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui tautan yang telah disampaikan. Kelas BAHASA kali ini menggunakan metode diskusi sejak awal yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para satuan kerja dan dapat lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan kelas BAHASA. Para peserta yang hadir diminta untuk menyampaikan bagaimana tindakan para satuan kerja saat menerima DIPA atau pada perencanaan, dan pelaksanaan anggaran.

d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan kelas BAHASA yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat miskonsepsi mengenai anggaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
2. Sebagian besar pelaksanaan keuangan satker dikerjakan oleh satu orang/operator saja. Para pengelola keuangan tidak ingin belajar sehingga tetap bertumpu pada satu orang saja.
3. Atas permasalahan tersebut, narasumber menginformasikan bahwa para BPP wajib memiliki rekening, dan menyusun LPJ BPP yang akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Hal ini, merupakan temuan BPK, yang mana para BPP tidak memiliki rekening untuk dikelola. Para bendahara membayar sesuai dengan kuitansi atau bukti lainnya yang sah, sehingga tidak ada perhitungan kas yang salah atau berbeda. Selain itu, Bendahara hanya membayar, yang melakukan perikatan merupakan PPK, staf PPK, atau staf PBJ. Disampaikan juga bahwa APBN bersifat *money follow program* dan *money follow function*.
4. Kegiatan ini membuat para peserta menjadi lebih paham mengenai pengelolaan anggaran yang lebih baik.

9. SOSIALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2023 SATKER LINGKUP KPPN SUNGAI PENUH**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 08.30 WIB s.d. selesai bertempat di Aula KPPN Sungai Penuh.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Sungai Penuh, dengan Satker lingkup KPPN Sungai Penuh.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan oleh Plt. Kepala KPPN Sungai Penuh dan dilanjutkan dengan pemaparan materi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 berupa Sosialisasi Penggunaan KKP. Selanjutnya, disampaikan mengenai Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang mencakup bahasan kualitas perencanaan, akselerasi pelaksanaan kegiatan, percepatan pengadaan barang dan jasa, akurasi penyaluran bansos dan banper, peningkatan kualitas belanja, serta monitoring dan evaluasi.

Strategi Peningkatan Nilai IKPA yang dapat dilakukan pada TA 2023, yaitu: (a) untuk indikator Capaian Output (25%), tepat waktu dan melakukan validasi terkait pengisian target, kelengkapan pengisian target tiap RO, pengisian capaian RO, dan kelengkapan pengisian data capaian output. (b) untuk indikator

Penyerapan Anggaran (20%), memperhatikan target penyerapan anggaran tiap jenis belanja tiap triwulan. (c) untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA (10%), melaksanakan revisi Hal III DIPA tepat waktu (tidak terlambat) maksimal 10 HK awal triwulan (kecuali triwulan I di bulan Februari).

Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada Satker dalam wilayah kerja KPPN Sungai Penuh dengan IKPA Terbaik Periode Triwulan IV Tahun 2022.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, didapati hal-hal sebagai berikut

- 1) Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 berupa: (1) Meningkatkan kualitas perencanaan, (2) Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, (3) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, (4) Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), (5) Meningkatkan Akuras penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), (6) Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), dan (7) Meningkatkan monitoring dan evaluasi..
- 2) Salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan ialah dengan mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
- 3) Satker diharapkan dapat meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terutama pada indikator deviasi hal III DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output.

10. KOORDINASI PEMBINAAN UMKM

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 14.00 s.d. 16.30 WIB bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan KPPN Kuala Tungkal dengan Satker Diskoperindag, DP3AP2KB, DPMD, dan PNM Mekaar.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan koordinasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal, Zamrud Utami, yang menyampaikan tentang pembiayaan ultra mikro (UMi) sebagai bentuk fasilitas pembiayaan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan (*unbankable*) dan realisasi pembiayaan pada wilayah kerja KPPN Kuala Tungkal.

Penyampaian materi pada kegiatan koordinasi antara lain mengenai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pembiayaan PNM Mekaar yang disampaikan oleh Kepala Unit PNM Unit Tungkal Ilir, Fhevi Lianty, dan Program-Program Diskoperindag terkait Pembinaan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Kepala Diskoperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafriwan.

**d. Hasil yang Dicapai**

Setelah dilaksanakan kegiatan koordinasi tersebut, disepakati untuk dilakukan koordinasi lanjutan, diantaranya adalah saling berbagi informasi dan melibatkan para pihak apabila akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan UMKM, sehingga bisa efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui fasilitasi pembiayaan UMi.

Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan Kolaborasi Pemberdayaan UMKM/UMi ini dapat memberikan bantuan bagi pelaku UMKM/UMi khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar usahanya dapat tumbuh dan berkembang dan diharapkan dengan diadakan kolaborasi pendampingan ini maka pelaku usaha UMKM/UMi dapat meningkat dalam tingkatan usahanya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan/kesejahteraannya. Secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

11. MONITORING DAN EVALUASI PNBP STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (649636)**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 10.00 s.d. 11.30 WIB bertempat di Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Talang Bakung, Jambi Selatan.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Satker Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh Bapak Arif Bakhri dengan menyampaikan maksud dan tujuan monev PNBP pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan antara lain sebagai upaya peningkatan pengelolaan PNBP melalui monitoring pelaksanaan PNBP identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNBP maupun upaya peningkatan potensi PNBP yang dapat dilakukan.

Kendala utama peningkatan potensi PNBP pada satker Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi antara lain Provinsi Jambi yang bukan merupakan area ekspor/pintu keluar komoditas perikanan ke luar negeri dan hanya merupakan area lalu lintas komoditas perikanan domestic dimana ditetapkan tarif sampai dengan Rp 0,- (tidak dikenakan biaya) sehingga secara langsung berdampak pada PNBP satker Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi.

**d. Hasil yang Dicapai**

Setelah dilaksanakan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PNBP, didapati hal sebagai berikut:

- 1) Secara umum satker Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi telah menatausahakan PNBP sesuai ketentuan antara lain penetapan target dan perencanaan serta proyeksi PNBP dalam DIPA, penyelenggaraan layanan dan penatausahaan billing PNBP, serta pertanggung jawaban pengelolaan PNBP melalui LPJ Bendahara Penerimaan dan Rekonsiliasi Internal.
- 2) Penyesuaian proyeksi PNBP pada halaman III DIPA belum dilakukan. Revisi penyesuaian proyeksi PNBP agar dilakukan mengacu pada kondisi dan perkiraan PNBP yang akan diterima selama tahun berjalan, selain itu perlu dilakukan revisi target PNBP jika terdapat perubahan dasar tarif layanan yang berdampak pada perkiraan realisasi PNPB.

12. KONFIRMASI STATUS PIUTANG NEGARA PADA KLP SINGKUT/KUD PUTRA TAMA

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 08.00 s.d. 12.30 WIB bertempat di KLP Singkut/KUD Putra Tama.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PPA II, Pejabat/Staf Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun dengan Pengurus KLP Singkut/KUD Putra Tama.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan Konfirmasi Status Piutang Negara dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atas temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas piutang pemberian pinjaman pada KLP Singkut pada Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor ND-50/PB.4/2023 serta mengonfirmasi lebih lanjut terkait status koperasi serta informasi yang relevan lainnya pada KLP Singkut/KUD Putra Tama.

Konfirmasi dilakukan dengan melakukan diskusi bersama Pengurus KLP Singkut/KUD Putra Tama untuk mendapatkan informasi mengenai status koperasi/badan hukum, keanggotaan, dan keberlangsungan bisnis/permodalan.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan konfirmasi status piutang negara, didapati hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan Bapak Halimi selaku pengurus, KUD Putra Tama merupakan entitas yang sama dengan Koperasi yang pada masa lalu pengurusnya adalah Bagiono dan Jimi Suryono (pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman) dengan jumlah anggota saat ini sekitar 90 orang anggota.

- 2) Koperasi baru mulai aktif menjalankan usaha selama 2 (dua) tahun terakhir, sebelumnya berstatus non aktif. Saat ini koperasi menjalankan usaha perdagangan Pupuk di ruko milik koperasi.
- 3) Dokumen terkait badan hukum, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, rapat anggota tahunan, neraca, dan laporan keuangan lainnya belum dapat diserahkan oleh pihak koperasi karena belum ditemukan.
- 4) Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan terus menjalin komunikasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun dan petugas pendamping KUD Putra Tama untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan

13. KEGIATAN SENAM BERSAMA, BAZAR UMKM, DAN BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HARI BAKTI PERBENDAHARAAN KE-19 TAHUN 2023 KPPN KUALA TUNGKAL

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 06.00 s.d. 10.00 WIB bertempat di Alun-Alun Kota Kuala Tungkal (*Car Free Day*).

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh seluruh *Stakeholders* pada KPPN Kuala Tungkal, dan melibatkan pula UMKM dan masyarakat setempat.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diawali dengan Senam Bersama yang diselenggarakan pada pukul 06.15 WIB sampai dengan pukul 07:00 WIB (45 menit). Senam diikuti oleh *stakeholders* KPPN Kuala Tungkal (tamu undangan) dan masyarakat umum. Sebelum senam dimulai, diberikan informasi lebih dahulu kepada seluruh masyarakat tentang Hari Bakti Perbendaharaan dan KPPN. Bazar UMKM diselenggarakan di lokasi yang sama yang diisi dengan produk UMKM yang menjual aneka makanan, kerajinan tangan, dan batik khas Kuala Tungkal. Selain penjualan produk UMKM, dibuka juga layanan jasa/produk perbankan. Kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat OPSEZI Kuala Tungkal, dengan membagikan Paket Sembako serta uang tunai kepada para penerima santunan di wilayah sekitar KPPN Kuala Tungkal.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah kegiatan dilaksanakan didapatkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Kegiatan Senam Bersama, Bazar UMKM, dan Bakti Sosial dalam Rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 oleh KPPN Kuala Tungkal berjalan dengan lancar dan sukses, serta sesuai tujuan acara. Hal tersebut karena adanya sinergi dan koordinasi yang sangat baik, pada internal KPPN Kuala Tungkal dan dengan pihak eksternal terkait.

14. PEKAN UMKM KEMENKEU SATU

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 06.00 s.d. 13.00 WIB bertempat di halaman KPPN Jambi (area CFD).

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Kemenkeu Satu Provinsi Jambi, BSI, BRI, Bank Jambi, PT PNM, PT Pegadaian, Perum Bulog, dan Mata Garuda.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan Pekan UMKM Kemenkeu Satu diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-176/PB.1/2023 hal Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke 19 Tahun 2023, sekaligus sebagai sarana sinergi pemberdayaan UMKM dengan semangat Kemenkeu Satu, media untuk melakukan

sosialisasi program-program Kementerian Keuangan untuk mendukung dan mendorong peran UMKM di Provinsi Jambi untuk naik kelas.

Kegiatan diawali dengan Senam Sehat Zumba untuk menarik pada pengunjung CFD untuk berkunjung ke area bazaar UMKM. Selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi sosialisasi yang dilakukan secara interaktif kepada seluruh masyarakat pengunjung maupun pelaku UMKM yang berpartisipasi, antara lain Talkshow DigiPay (DJPb), "Lelang Terpercaya" (DJKN), "Payo Kita Ekspor, Ekspor itu Mudah" (DJBC), "Pajak Kuat, UMKM Hebat" (DJP), Kupas Tuntas Beasiswa LPDP (Mata Garuda) dan, Penjelasan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dalam Bentuk Produk Pembiayaan UMKM (KUR/UMi) oleh Perbankan/LKBB pendukung.

Kegiatan ini termasuk Bazaar yang diikuti oleh 20 UMKM dengan rincian 16 UMKM binaan Kemenkeu Satu dan 4 UMKM binaan Bank/LKBB. Terdapat penjualan sembako murah oleh Perum Bulog Kanwil Jambi. Selain itu, ada konsultasi tambahan terkait materi yang disampaikan pada *talkshow* maupun pertanyaan-pertanyaan lain terkait dari pelaku UMKM maupun masyarakat pada *booth* Kemenkeu Satu dan *booth* Bank/LKBB. Kegiatan Pekan UMKM dimeriahkan juga dengan *band performance* dan pembagian *doorprize*.



B. Komunikasi Publik

<https://www.youtube.com/watch?v=1EPAPhJ118c>
<https://www.instagram.com/p/Ca6e3ev6vG8/?gclid=NTU1Mzc3ZGMt>

Jambi Ekspres

<https://jambiekspres.disway.id/read/657909/dukung-umkm-naik-kelas-kemenkeu-satu-jambi-adakan-pekan-umkm>

Tribun Jambi

- <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/05/bank-jambi-ditunjuk-jadi-bank-daerah-yang-dapat-salurkan-kur-dorong-umkm-naik-kelas>
- <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/05/kemenkeu-jambi-beri-dorongan-konkrit-umkm-dengan-ragam-kredit-dijerita-subsidi-bunga>
- <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/05/hari-bakti-persembahkan-ke-19-umkm-jambi-didorong-naik-kelas-dan-legat>

TVRI

<https://www.youtube.com/watch?v=1EPAPhJ118c>

RRI

- https://www.rri.co.id/jambi/daerah/180136/pajanan-kementerian-keuangan-di-jambi-gelar-pekan-umkm?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- <https://www.rri.co.id/jambi/keuangan/180170/kantor-cajak-jambi-optimis-tarjet-pajak>
- https://www.rri.co.id/jambi/umkm/180181/dukungan-pemerintah-untuk-umkm-dinas-masrifi-perpajakan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Antara News

<https://jambi.antaranews.com/berita/240978/kemenkeu-perkuat-perannya-bina-umkm-di-jambi>

Website DJPb Jambi

<https://djab.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi/id/data-publikasi/berita-terbaru/2938-berikan-dukungan-kepada-umkm-kemenkeu-satu-jambi-adakan-pekan-umkm.html>

C. Daftar Omzet Per UMKM

NO	UNIT PIC	NAMA UMKM	PEMILIK	Omzet
1	Kanwil DJPb	Umah Kopi Muara Bungo	Ojed Sudrajat	740.000
2	Kanwil DJPb	Hila Kikchan	Hilda Gaziyah	2.000.000
3	Kanwil DJPb	Lapis Legit Tanggo Rajo	Surismawati	434.500
4	Kanwil DJPb	Keripik Nenas Abadi	H. Saman	435.000
5	KPDDP	Healthy Cendol 18 Kota Jambi	Mira Santika	1.150.000
6	KPDDP	Snack Alifa	Yunila	300.000
7	KPP Jambi Teleneipura	Zazid Brownies	Nur Kasma Dewi	1.120.000
8	KPP Jambi Teleneipura	Lazatta	Panca Novian	894.000
9	KPP Jambi Pelayangan	Gendhis Homemade Food	Lulu dan Sheila	1.450.000
10	KPPN Jambi	Ratu Djemoe	Ika Aniyani	969.000
11	KPPN Jambi	Tutul Manasa	Dina Faridra Septiana	444.000
12	KPPBC	Gubuk Nemas	Rina Mardiana	456.000
13	KPPBC	Kopi Kia	Adzkin Nurul Syfa	700.000
14	KPPBC	ILMI	Krisna	2.600.000
15	KPKN Jambi	"PUSPA NGUNYAH BAE"	Ibu Puspa	500.000
16	KPKN Jambi	Rempeyek ILHAMUMTAZA	Zailun	825.000
17	Bank BRI	Zhupa Sloop	Linda	1.769.000
18	Bank Jambi	Lapis Angso Duo	Fitri Lida	585.000
19	Bank BSI	Keripik Pisang Lala	Laila Hayati	1.380.000
20	PNM	DAPUR MAMA FAFI	NUR JANAH	613.300
21	BULOG (Sembako Murah)	Parum BULOG	Rusli	11.729.500
Total termasuk BULOG				31.894.300
UMKM				19.364.800

d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan Pekan Pekan UMKM Kemenkeu Satu, didapati hal sebagai berikut

- Adapun rincian pengunjung yang berkonsultasi pada *booth* yang tersedia antara lain konsultasi DigiPay sebanyak 20 pengunjung, konsultasi ekspor 15 pengunjung, konsultasi perpajakan 25 pengunjung, konsultasi lelang 4 pengunjung, *booth* Bank Jambi 37 pengunjung, *booth* BSI 14 pengunjung, dan *booth* PNM 20 pengunjung.
- Total Transaksi yang berhasil dicapai pada Pekan UMKM ini adalah senilai Rp31.094.300 yang terdiri dari transaksi di 20 UMKM senilai Rp19.364.800 dan penjualan sembako murah oleh BULOG senilai Rp11.729.500.
- Seluruh kegiatan telah dipersiapkan melalui rapat persiapan dan perencanaan, *technical meeting*, pengusulan rencana biaya, gladi bersih dan finalisasi acara. Secara umum, kegiatan berjalan dengan lancar.
- Beberapa hal yang telah dilaksanakan dengan baik di antaranya rundown acara yang telah berjalan sesuai rencana, metode dalam menarik massa untuk masuk ke area *bazaar*, publikasi media sosial, serta keterlibatan dan partisipasi Kemenkeu Satu serta Bank/LKBB.
- Adapun beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi dan dapat ditingkatkan lagi pada penyelenggaraan berikutnya antara lain:
 - Perlu menata aliran informasi dan standar dukungan dari Perbankan/Penyalur di daerah;
 - Jumlah dan produk UMKM yang dapat dibuat lebih banyak dan bervariasi sesuai pangsa pasar CFD,

- c) Penyiapan area oleh EO yang perlu lebih diakselerasi, serta dekorasi booth UMKM yang lebih terlihat jelas papan nama UMKM-nya,
- d) Waktu persiapan yang relatif singkat, di tengah kepadatan pelaksanaan tugas Bidang PPA II, meskipun hal ini masih *manageable* karena seluruh penyiapan area dan pelaksanaan acara dibantu oleh EO.

15. SOSIALISASI PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023

a. Waktu dan Tempat

Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 pukul 9.00 s.d selesai bertempat di Aula KPPN Kuala Tungkal.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai KPPN Kuala Tungkal dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Plh. Kepala KPPN Kuala Tungkal, Rukmi Wijaya, dengan memberikan penekanan bahwa penyaluran DAK Fisik ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena merupakan salah satu Transfer Ke Daerah untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan public daerah. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Kebijakan Umum DAK Fisik dan Pengaturan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, didapati beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perlu meningkatkan koordinasi antaranya pemda (BPKAD, OPD dan kementerian/lembaga) dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik
- 2) Perlunya *sharing knowledge* terutama saat terjadi mutasi/rotasi di internal pegawai pemda agar penyaluran DAK Fisik menjadi lebih cepat

- 3) Pemda (BPKAD dan OPD) agar memperhatikan siklus penyusunan DAK Fisik mulai dari perencanaan sampai ke penyaluran, termasuk jadwal-jadwal revisi Rencana Kegiatan

16. KOORDINASI PELAKSANAAN ASISTENSI BLUD TAHUN 2023 BERSAMA DENGAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Koordinasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 pukul 08.30 s.d. 10.00 WIB bertempat di Ruang Kepala Bidang Pembina BLUD dan BUMD Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Bidang PPA II Kanwil DJPb Jambi, Kepala Bidang Pembina BLUD dan BUMD Provinsi Jambi, dan Kasubbag Pembinaan BLUD.

c. Rincian Kegiatan

Acara dimulai dengan pembukaan dari Kepala Seksi PPA II C, Bapak Lilik Kurniawan. Disampaikan bahwa selain melaksanakan tugas untuk melaksanakan asistensi terhadap BLUD, Kanwil DJPb Provinsi Jambi ingin memotret dan mengetahui terkait bagaimana pembinaan BLUD yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya kegiatan dilaksanakan dengan diskusi oleh Kepala Bidang PPA II, Kepala Seksi PPA II C, Kepala Bidang Pembina BLUD dan BUMD Provinsi Jambi, dan Kasubbag Pembinaan BLUD.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan koordinasi, didapati beberapa poin sebagai berikut:

- 4) Pembinaan BLUD oleh Biro Perekonomian dilaksanakan sekali dalam setahun berupa pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan tata kelola BLUD bersama dengan BPKP

- 5) Pembinaan BLUD oleh Biro Perekonomian belum efisien karena terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah belum adanya aturan yang spesifik terkait pembinaan dan pengawasan BLUD di Provinsi Jambi
- 6) Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penandatanganan MoU dengan beberapa pemda di lingkup Provinsi Jambi terkait FKPKN yang di dalamnya terdapat klausul mengenai asistensi BLUD. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi terkait asistensi terhadap BLUD
- 7) Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb Provinsi memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan BLU. Selain itu, terdapat tugas untuk melakukan asistensi BLUD. Selaku pembina BLU, memiliki kertas kerja pembinaan yang dapat di *benchmark* dalam pelaksanaan pembinaan BLUD oleh Pemda.

17. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2023

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 pukul 09.30 s.d. 11.30 WIB melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID*: 449 902 925 574; *Passcode*: HKym4j).

b. Unit/Pihak Terlibat

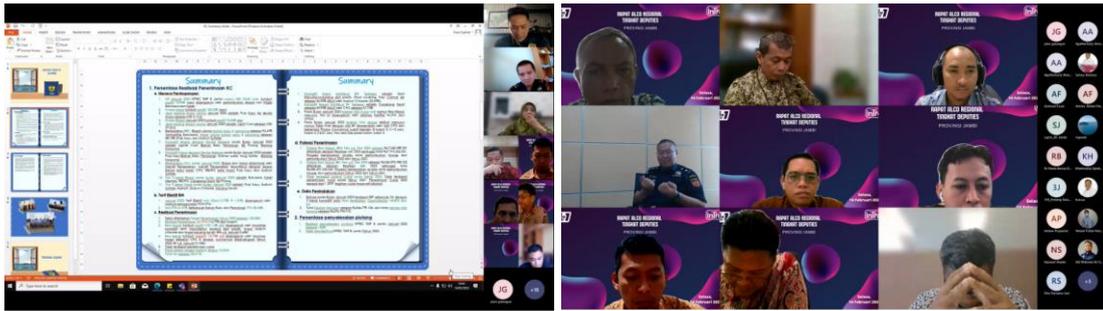
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan perwakilan pejabat fungsional dan pegawai lingkup Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PPAK, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Januari 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Muara Bungo)
- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (KPPBC TMP B Jambi).
- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I dan KPPN Jambi)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional dan Realisasi TKD (PPA II).

Pemaparan dilakukan oleh Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala Bidang PPA I, Kepala KPPN Jambi, Kepala KPP Pratama Muara Bungo, Perwakilan KPP Pratama Jambi Telanaipura, dan Kepala Bidang PPA II.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Isu Belanja

- Usaha yang telah dilakukan adalah dengan mendorong satker untuk melakukan revisi sesuai dengan realisasi belanja pegawai di Bulan Januari
- Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bansos kemudian penyaluran dilakukan secara bertahap tanpa menunggu terkumpulnya seluruh data penerima.
- Telah diberikan penegasan dan arahan untuk segera melakukan update halaman III DIPA melalui S-81/WPB.06/2023 tanggal 2 Februari 2023 karena untuk triwulan I ini masih dimungkinkan untuk penyesuaian halaman III hingga tanggal 14 Februari 2023.

2) Local Issue

- Adanya peningkatan estimasi target penerimaan pajak di KPP lingkup Provinsi Jambi, namun sebaliknya dengan proyeksi penerimaan pajak internasional dari DJBC di Jambi mengalami penurunan dibanding tahun 2022. untuk itu diperlukan perhitungan prognosa yang akurat pada penentuan prognosa penerimaan tahun 2023 bagi pajak, PNBPN, dan Bea Cukai di Jambi sangat diperlukan, dengan mempertimbangkan harga komoditi yang sangat fluktuatif.
- Mengadakan koordinasi antar Kemenkeu Satu bersama Pemda untuk mendorong pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai sarana tempat penimbunan barang dari luar daerah pabean untuk pengiriman komoditi unggulan daerah, misal di Kerinci sebagai penghasil kayu manis dan kopi, serta Tanjung Jabung penghasil ikan segar.
- Perlu dilakukan pembinaan bersama dengan Sekber Pokja UMKM kepada UMKM dengan komoditi unggulan, serta dimungkinkan adanya kajian bersama terkait tembakau melalui pendirian KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang ada di Kabupaten Kerinci, sehingga hasil dari pertanian tembakau maksimal dirasakan oleh petani dan pemerintah daerah setempat.

18. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 Januari 2023

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 13.30 s.d. 15.30 WIB secara *hybrid* pada Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan melalui media virtual *Teams* (Meeting ID: 416 667 606 539; Passcode: crT7SZ).

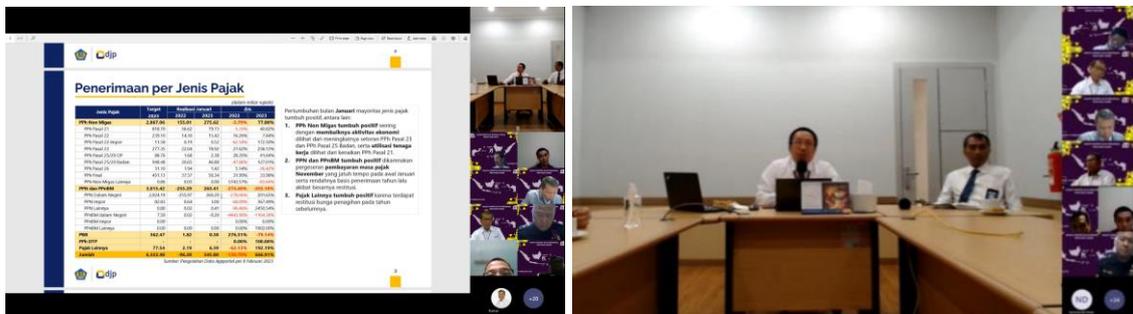
b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Administrator Kanwil DJP Sumbar Jambi, Perwakilan Kanwil DJBC Sumbagtim, Perwakilan Kanwil DJKN Sumsel Babel, Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan, Kepala KPP Pratama Bangko, Kepala KPPN Kuala Tungkal, Plt. Kepala KPPN Sungai Penuh, Kepala KPDDP Jambi, Kepala KPP Pratama Kuala Tungkal, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPPN Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Januari 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNBPN dan Hibah, serta capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 31 Januari 2023 dan isu strategis lainnya.

Pemaparan dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan, Perwakilan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Perwakilan DJKN Provinsi Sumsel Jambi dan Babel, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi juga menyampaikan beberapa *policy response* terkait isu strategis dan isu lokal yang terjadi, diantaranya:

- a) Mendorong koordinasi Kemenkeu Regional Jambi untuk memperkuat analisis ekonomi dan fiskal, khususnya terkait penerimaan.
- b) Mengupayakan deviasi realisasi dan proyeksi yang sekecil mungkin melalui penghitungan prognosa penerimaan tahun 2023 yang akurat baik bagi pajak, lelang dan/atau PNBK, dan Bea Cukai di Jambi, dengan mempertimbangkan harga komoditi yang sangat fluktuatif.
- c) Terus mengoptimalkan sinergi pemberdayaan UMKM, salah satunya pembinaan pada UMKM dengan komoditi unggulan serta koordinasi dengan Pemda setempat untuk mendukung pembangunan sarana perantara ekspor atas komoditi unggulan tersebut.
- d) Ditjen Perbendaharaan dengan tugas dan fungsinya melalui APBN terus melanjutkan pengawasan atas desa tertinggal yang juga termasuk pada peta daerah rawan pangan.

19. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2022**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Maret 2023 pukul 13.30 s.d.15.30 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPPN Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayangan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Bapak Agung Richardus. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCO Regional s.d. 28 Februari 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 28 Februari 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh pejabat pengawas KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Pelayangan, pejabat pengawas KPP Jambi Telanaipura, pejabat pengawas KPDDP Jambi, perwakilan bidang PPA I, pejabat pengawas KPPN Jambi, dan pejabat pengawas bidang PPA II.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Terkait kasus pajak yang sedang ramai di media, sejauh ini tidak berpengaruh pada penerimaan perpajakan di KPP Jambi Telanaipura dan KPP Jambi Pelayangan.
- 2) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 28 Februari 2023.

20. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2022

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Maret 2023 pukul 14.00 s.d.16.00 WIB secara hybrid di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi peserta di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams* (*Meeting ID: 449 902 925 574; Passcode: HKym4j*) bagi peserta dari luar Kota Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Pegawai Asministrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang PAPK, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 28 Februari 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

- 1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Jambi Pelayangan, KPP Bangko)
- 2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, isu strategis dan local issue (KPPBC TMP B Jambi).

- 3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN dan Special Mission dan isu strategis (KPKNL Jambi)
- 4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I dan KPPN Jambi)
- 5) Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD, dan issue strategis (PPA II)



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Issue Belanja

Melaksanakan Monev pelaksanaan anggaran dan mendorong satker untuk melakukan koordinasi internal satker maupun dengan unit eselon I K/L untuk menyinkronkan dan memberi informasi lebih dini mengenai revisi pusat (DJA) yang bebarengan dengan jadwal revisi Hal III di Kanwil.

2) Local Issue

- Atas ekspor yang belum dapat tercatat di Instansi Bea Cukai Provinsi Jambi, Kemenkeu Satu bersama Pemda dapat bekerja sama untuk mendorong pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB).
- Terkait dengan berbagai isu yang beredar, diharapkan Instansi Kementerian Keuangan yang melakukan pelayanan dan bersentuhan langsung kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang lebih dibandingkan tahun sebelumnya untuk mengikis image negative.

3) Analisis Tematik

- Pemerintah Kota Jambi pernah menjadi pilot project dalam penanganan sampah serta sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional dalam upaya pengolahan sampah.
- Dukungan pemerintah atas pengelolaan sampah dapat terlihat pada peningkatan pagu APBN, dimana pagu untuk K/L adalah Rp6,56 M.
- Belum keseluruhan Rumah Tangga di Kab/Kota dapat mengakses air bersih dan sanitasi yang layak
- Perlu upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan dan manajemen PDAM.

21. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2023

a. Waktu dan Tempat

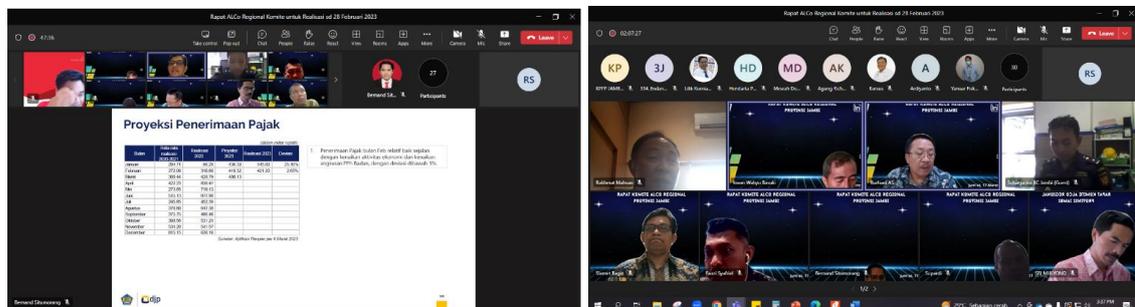
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 pukul 13.30 s.d. 15.00 WIB melalui media virtual Teams (*Meeting ID: 484 268 268 202; Passcode: ALZUZL*)

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Pejabat Administrator Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 28 Februari 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNPB dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 28 Februari 2023 serta issue strategis lainnya.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 28 Februari 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

1. Terdapat optimisme dari perpajakan, jika dilihat dari sisi pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diharapkan bisa berlanjut karena seperti yang kita ketahui 80% belanja Negara kita di biayai dari sektor perpajakan juga termasuk bea cukai.
2. Hal menggembirakan juga pada sisi neraca perdagangan yang mengalami surplus. Sisi pendapatan tumbuh dipengaruhi oleh sektor non migas yaitu



- Batubara. Pengangkutan batubara masih menyisakan masalah yang mengganggu lalu lintas dan aktifitas masyarakat.
3. Bermitra dengan Perbankan untuk dapat memaksimalkan pelelangan yang ada di Perbankan diharapkan dapat meningkatkan PNBP dari lelang.
 4. Berbagai hambatan agar terus dapat dikoordinasikan, termasuk dengan satkersatker yang di Jambi, sehingga dengan komunikasi yang intens permasalahanpermasalahan dapat dicapture dengan lebih lengkap dan jelas sehingga dapat ditemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi 5. Dari sisi belanja, agar kita terus mendorong untuk memaksimalkan belanja pegawai, belanja barang, dan utamanya realisasi belanja modal yang biasanya lebih rendah dari pada belanja lainnya yang dapat dilakukan juga salah satunya kepada satker di lingkup Kementerian Keuangan.



FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS/ TEMATIK

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

PELAKSANAAN KEGIATAN TEMATIK

1. SOSIALISASI PMK PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENGGUNAAN DATA P3KE

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 pukul 08.30 s.d. 13.00 WIB bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi, KPPN Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, BKKBN Provinsi Jambi, Bakeuda Provinsi Jambi, serta BPKAD dan DPMD dalam wilayah Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

- 1) Penyampaian Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Kepala Bidang PPA II
 - a. Di tahun 2022, masih terdapat kesalahan dalam melakukan input target output, dimohon kepada Pemda untuk melakukan pengecekan kembali dengan melakukan input sesuai satuan unitnya bukan rupiahnya karena apabila dilakukan analisis terhadap dana desa, bisa terjadi *misleading* terhadap penggunaan dana desa
 - b. Pemda bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen persyaratan dalam penyaluran dana desa
 - c. APBDes pasti akan dilakukan perubahan bukan hanya karena terbitnya PMK 201/PMK.07/2022 tetapi juga karena terdapat alokasi tambahan dana desa
 - d. Alokasi penyaluran dana desa untuk BLT Desa adalah 10%-25% dengan minimal penyaluran 10% wajib dipenuhi berdasarkan data P3KE
 - e. Apabila berdasarkan Musrenbangdes keluarga yang memenuhi kriteria KPM lebih dari 25% maka kelebihan tersebut tetap dilakukan penyaluran berdasarkan earmarked menggunakan dana desa nonBLT
 - f. Prioritas penggunaan dana desa adalah RKP Desa, disusun berdasarkan SDGs Desa, data yang disediakan kementerian, dan aspirasi masyarakat desa yang nantinya disusun menjadi APBDes.
- 2) Penyampaian Materi Optimalisasi Data P3KE dalam Sinergi Dana Desa Tahun 2023 oleh Bappeda Provinsi Jambi
 - a. P3KE telah menjadi prioritas nasional serta menjadi ajang kita bersama dalam perkembangan kemiskinan ekstrem dengan penghitungan secara rinci menggunakan standar dari *World Bank*. Kemiskinan Ekstrem dihitung dengan menggunakan hitungan absolut sehingga bisa digunakan untuk melihat profil masing – masing keluarga melalui program kegiatan di

- masing – masing daerah. Melalui data P3KE, kebutuhan masing – masing perangkat desa disediakan data *by name by address*.
- b. Percepatan pensasaran untuk kemiskinan ekstrem dilakukan pada Desil 1 terlebih dahulu. Ketersediaan data P3KE diberikan melalui link dari Kemenko PMK yang dapat dilihat secara agregat posisi per kabupaten/kota sampai peta sebaran per keluarga dari Desil 1 sampai dengan Desil 4 hingga status ketenagakerjaannya yang dilakukan pemilahan agregat dari indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan informasi rumah.
 - c. Data P3KE bukan menjadi tolak belakang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data P3KE merupakan data pelengkap DTKS dengan harapan seluruh verifikasi dan validasi P3KE menjadi bahan rujukan kita bersama dibantu dengan Pemerintah Pusat yang saat ini melakukan evaluasi dinilai masih belum optimal di kabupaten/kota sehingga masih terdapat banyak data *exclusion error* dan *inclusion error*. Updating data P3KE tidak bisa langsung diterima begitu saja, tetapi harus tetap dilakukan verifikasi dalam rangka mengatasi adanya perubahan kondisi.
 - d. Banyak tantangan dan upaya yang dilakukan salah satunya dengan penguatan komitmen semua pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan baik pemerintah, DRPD, swasta, dan masyarakat.
- 3) Penyampaian Materi Peran Dana Desa dalam Sinkronisasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting oleh DP3AP2 Provinsi Jambi
- a. Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah menu pilihan yang disediakan oleh pemerintah pusat bagi kepala desa untuk menetapkan kegiatan prioritas mana yang akan dipilih dalam pemanfaatan dana desa di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan prioritas yang disepakati dalam forum Musdes penyusunan RKPDesa dan penetapan APBDesa.
 - b. Pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, pencegahan dan penurunan stunting masih menjadi salah satu kegiatan prioritas pilihan yang harus diselesaikan di desa.
 - c. Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi sensitif dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, meningkatkan literasi dan advokasi hukum serta norma kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat desa.
 - d. Upaya konkret yang bisa dilakukan oleh desa dalam rangka mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa sebagai output dari kegiatan sosialisasi:
 - pelaksanaan rembug stunting di desa;
 - pemberian makanan tambahan yang bekesinambungan;

- pemberian insentif terhadap KPM, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya;
 - mensosialisasikan tentang stunting melalui kampanye dan promosi.
- 4) Penyampaian Data Percepatan Penurunan Stunting dari BKKBN Provinsi Jambi
- a. Data prevalensi stunting menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Ketika kita sibuk memfokuskan diri untuk menangani anak stunting, pada saat yang bersamaan kita memiliki data keluarga berisiko stunting yang setiap hari selalu ada sehingga menambah angka anak stunting berkali – kali lipat di Provinsi Jambi.
 - b. Faktor yang mendukung meningkatnya angka stunting adalah keluarga risiko stunting dengan SAM (sistem air minum) tidak layak, keluarga risiko stunting dengan jamban tidak layak, gambaran kondisi 4 terlalu pada keluarga sasaran, yaitu terlalu muda, terlalu tua (diatas 40 tahun), terlalu dekat (di bawah 2 tahun), dan terlalu banyak.
 - c. Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting, telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Provinsi Jambi menjadi yang pertama menyelesaikan administrasi tersebut. Setiap desa telah ada tim pendamping keluarga, terdiri dari Bidan desa, Kader TP PKK, dan Kader KB.
 - d. Dengan adanya data baik stunting dan keluarga berisiko stunting, tim pendamping dapat melakukan pendampingan dan mitigasi secara utuh.
- 5) Peran Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Hewani daro Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
- a. Kita harus menjamin ketersediaan pangan di Indonesia mengingat arahan presiden yaitu tidak boleh satupun penduduk Indonesia yang lapar;
 - b. Provinsi Jambi masih kekurangan produksi internal sehingga harus mendatangkan dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan;
 - c. Pemanfaatan pekarangan bisa mengefisiensikan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp350-450 ribu per bulan, kemudian kelebihannya yang lain bisa dipasarkan melalui BUMDes sehingga diharapkan BUMDes dapat mengkoordinir hasil pemanfaatan pekarangan tersebut;
 - d. Data FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) merupakan data dengan pendekatan wilayah yang disusun oleh Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pendekatan individu dapat menggunakan data stunting dan P3KE dimana ketiga data ini saling berkaitan;
 - e. Suatu produksi maupun komoditi pangan harus diawasi secara bersama, salah satunya yang sudah dimiliki yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, didapatkan poin-poin sebagai berikut:

- 1) Proses penetapan pagu dana desa per desa menunggu ditetapkannya UU APBN, Perpres rincian APBN, dan sinkronisasi penetapan peraturan tingkat Menteri yang harus mendapatkan persetujuan Presiden dikarenakan keterkaitan antara beberapa Kementerian lainnya. Proses penetapan tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga baru bisa ditetapkan di bulan Desember. Oleh karena itu, dimohon masukan dari perangkat desa tentang bagaimana pola penganggaran dan penetapan APBDes sehingga harapannya PMK dapat terbit sebelum RKPDes dan/atau APBDes ditetapkan.
- 2) Kementerian Keuangan selama dua tahun terakhir melakukan intervensi dana desa karena ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Covid-19 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu intervensi dari pemerintah pusat untuk melihat bagaimana keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa karena desa juga merupakan salah satu daerah otonom.
- 3) PMK yang terbit setelah ditetapkan APBDes memang selalu menjadi keluhan selama dua tahun ke belakang karena desa yang mengalami penurunan alokasi adalah notabene desa yang baik dalam penggunaan dana desanya dan baik dalam pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatannya. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi tugas kita bersama supaya bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat agar kinerja desa yang baik tidak menjadi sia – sia.
- 4) Data P3KE bukan sebagai pelengkap, tetapi data yang saling melengkapi (data komplementaritas). Mengingat kita juga dalam proses Indonesia menjadi satu data, jangan sampai ada pandangan bahwa data yang diberikan menjadi penghambat penyaluran. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, perlu ditegaskan kembali bahwa data yang digunakan adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan ketika melakukan pengukuran

kemiskinan ekstrem sudah ditetapkan bahwa data yang digunakan adalah P3KE. Data tersebut tidak menjadi bias karena sudah ada regulasi naungan yang mengatur baik melalui Inpres maupun Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022

- 5) Data P3KE tidak bisa hanya diterima secara mentah, tetapi tetap harus dilakukan verifikasi kembali oleh desa karena tidak menutup kemungkinan bahwa data mengalami *human error*.
- 6) Ketika BLT saat ini menggunakan data P3KE dan mengalami error maka tolong segera dikoordinasikan dan sudah diberikan juga ruang untuk tidak hanya menggunakan acuan data P3KE
- 7) Ketersediaan data P3KE *by name by address* ada prosedur pemanfaatannya sehingga tidak bisa disebarluaskan secara bebas ke ranah umum, di samping penggunaan data bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, juga karena data tersebut juga memiliki unsur politis. Namun, ketika ada keluarga P3KE tidak mendapat bantuan, maka itu menjadi tugas kita agar pensasarannya dilakukan secara tepat.
- 8) *Progress* dari masing – masing kabupaten/kota dalam pencairan dana desa sudah cukup baik, namun masih perlu dilihat kembali bagaimana pemanfaatan atas dana desa yang sudah diberikan agar dapat dipetakan penggunaan dana desa tersebut dengan tepat di beberapa sektor seperti sanitasi, infrastruktur, dll.

2. SHARING SESSION PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH LINGKUP KABUPATEN MERANGIN DAN SAROLANGUN

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB yang dilakukan secara *hybrid*, bertempat di Aula KPPN Bangko bagi Pemda Kabupaten Merangin dan *zoom meeting* bagi Pemda Kabupaten Sarolangun.

b. Unit/Pihak Terlibat

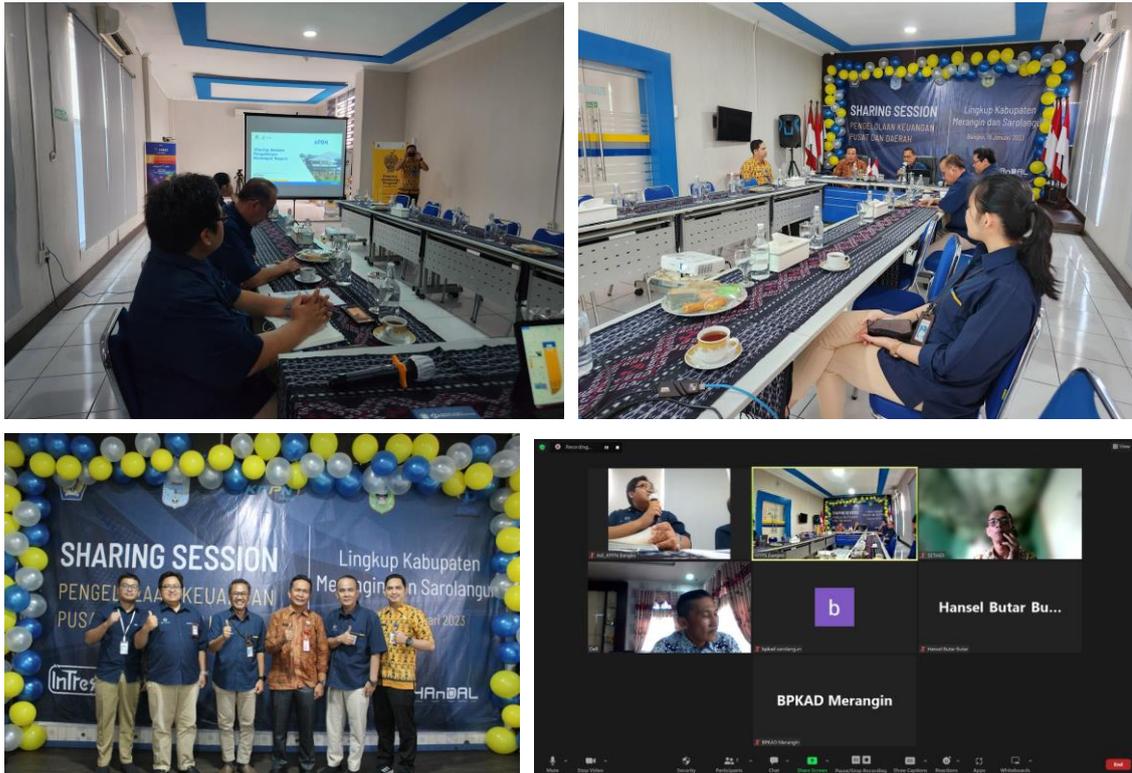
Kegiatan dilakukan dengan melibatkan Pejabat dan Pegawai KPPN Bangko bersama BPKAD Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

c. Rincian Kegiatan

Sharing Session dilaksanakan dalam rangka untuk *sharing* dan diskusi terkait pengelolaan keuangan pusat dan daerah, serta meningkatkan koordinasi dan lebih dekat dengan Pemda Kabupaten Merangin dan Pemda Kabupaten Sarolangun dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan UMKM, dan penyaluran TKDD.

Kegiatan dilakukan dengan pemaparan materi dan diskusi mengenai Pengelolaan Keuangan Pusat oleh Kepala KPPN Bangko, Mekanisme Pelaksanaan

APBD oleh BPKAD Merangin, dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan APBD oleh BPKAD Sarolangun



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan kegiatan *sharing session*, didapatkan hal sebagai berikut:

- 1) Sumber pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di- *earmark* (*Spesific Grants*) di tahun 2023 sangat berbeda dengan tahun 2022 lalu yang salur sebesar 58 Miliar/bulan. hal ini menyebabkan Pemda Kabupaten Merangin kesulitan mengatur *cash flow* bulanan. Terkait hal tersebut, agar dibuat kajian singkat terkait *cash flow* dan juga perkembangan di daerah Kabupaten Merangin untuk disampaikan pada saat rapat ALCo bersama Kanwil DJPB Provinsi Jambi.
- 2) Pendapatan melalui DAU menjadi sumber pendapatan terbesar Pemda Kabupaten Merangin dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 6-7% dari total pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengurangan DAU tahun ini dari tahun sebelumnya memiliki dampak yang signifikan bagi pengelolaan keuangan di Kabupaten Merangin.
- 3) Untuk kedepannya, KPPN Bangko, BPKAD Kabupaten Merangin dan BPKAD Kabupaten Sarolangun senantiasa berkoordinasi secara intensif baik dalam hal penyaluran TKD, pengelolaan keuangan daerah maupun pemberdayaan UMKM.

3. **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYALURAN BOK PUSKESMAS TA 2023**

a. **Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 pukul 10.00 wib s.d. selesai yang dilaksanakan secara *hybrid* bertempat di Aula KPPN Bangko untuk Pemda Kabupaten Merangin dan melalui *zoom meeting* untuk Pemda Kabupaten Sarolangun.

b. **Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh BPKAD Kabupaten Merangin, Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Bank BNI Cabang Bangko secara tatap muka di Aula KPPN Bangko dan BPKAD Kabupaten Sarolangun, Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dan Bank BNI Cabang Sarolangun secara daring melalui *zoom meeting*.

c. **Rincian Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Merangin, Pemda Kabupaten Sarolangun, dan Bank BNI Cabang Bangko dan Sarolangun dalam rangka Penyaluran BOK Puskesmas TA. 2023.

Kegiatan dibuka dengan kata sambutan oleh Kepala KPPN Bangko, lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Bank KPPN Bangko terkait Peyaluran BOK Puskesmas TA. 2023. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan oleh sesi diskusi oleh seluruh peserta FGD.



d. **Hasil yang Dicapai**

Dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa KPPN Bangko, Pemda Kabupaten Merangin dan Pemda Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara intensif demi kelancaran penyaluran BOK Puskesmas TA. 2023. Selain itu, Bank BNI juga berkomitmen menjaga amanah dari kantor pusat Kemenkeu dan Kemenkeu karena sudah dipercaya menjadi Bank

Penyalur BOK Puskesmas TA. 2023 dan senantiasa berkoordinasi dengan KPPN dan Pemda demi kelancaran penyaluran BOK Puskesmas TA. 2023.

4. DISKUSI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERSAMA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 pukul 09.30 s.d. 11.00 WIB bertempat di Kantor Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PAK dan Bidang PPA II dengan Kepala Korwas APD dan Pejabat Fungsional Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PAK dengan diskusi yang membahas penggunaan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun LKPD. Hal ini berkaitan dengan tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk melaksanakan konsolidasi LKPP dan LKPD. Terdapat kendala dalam proses konsolidasi tersebut karena LKPD yang dapat diakses oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi hanya LRA dan belum rinci.

Selanjutnya pembahasan dilakukan dengan konfirmasi kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran menggunakan Aplikasi SIPD di tahun anggaran 2023.



d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa hal antara lain pemerintah daerah melaksanakan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD dari Kemendagri, tetapi dalam penatausahaan hingga pelaporan keuangan diberikan fleksibilitas terkait aplikasi yang digunakan. Di lingkup Provinsi Jambi, pada tahun 2022 terdapat 4 aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam penatausahaan hingga pelaporan yaitu SIMDA Keuangan, SIMDA FMIS, SIPD, dan SIPKD. Aplikasi SIMDA Keuangan sudah tidak dikembangkan oleh BPKP sehingga diharuskan menggunakan SIMDA FMIS di tahun 2023. Selain itu, tidak terdapat dashboard untuk memantau keuangan pemerintah daerah pada aplikasi SIMDA.

BPKP tidak memeriksa terkait dengan pertanggungjawab, tetapi membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, BPKP juga mengevaluasi kesesuaian kegiatan dan program yang dilaksanakan pmda dengan program pemerintah pusat. BPKP juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa. Penatausahaan dana desa menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

5. PEMETAAN DAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DESA TERTINGGAL DI DESA TELUK SIKUMBANG, KEC. MUARA SIAU, KAB. MERANGIN

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2023 pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB bertempat di Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Desa Teluk Sikumbang.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PPA II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Merangin dengan Perangkat Desa Teluk Sikumbang.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Datuk Rio (Kepala Desa) Solihin, Sekretaris Camat Muara Siau, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian arahan oleh Kepala DPMD Kabupaten Merangin, Kepala Bidang PPA II, dan Kepala KPPN Bangko. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mengonfirmasi antara data P3KE milik pemerintah dengan kondisi riil dan data milik kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan.

Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan perangkat desa terkait identifikasi desa berdasarkan beberapa indeks yang membentuk Indeks Desa Membangun seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kondisi Kemiskinan Desa Tertinggal, didapati hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa hal yang menjadi perhatian utama pada Desa Teluk Sikumbang, adalah mengenai kondisi permukiman masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi oleh seluruh rumah tangga, sanitasi atau jamban yang layak, serta belum adanya tempat pembuangan sampah terpusat. Selain itu, akses jalan menuju desa hanya tersedia satu jalan tanpa alternatif akses lain yang membuat desa sewaktu – waktu dapat terisolasi.
- 2) Dari hasil kunjungan, didapati kebutuhan dari Desa Teluk Sikumbang antara lain:
 - Fasilitas kesehatan berupa tabung oksigen, *emergency trolley*, *ambulance* desa, dan pembuatan pagar Puskesmas serta tenaga kesehatan desa yaitu dokter desa
 - Fasilitas Pendidikan tingkat SMP yang satu atap dengan SD serta tenaga penyuluh untuk pelatihan bagi masyarakat desa
 - Fasilitas terkait jasa pengiriman barang supaya memudahkan warga desa jika akan melakukan pengiriman barang
 - Kebutuhan pelebaran jalan dan pengurangan kecuraman jalan karena adanya potensi bencana alam
- 3) Diperlukan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan LPMP Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, dan PT. Pos Indonesia dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan desa yang belum terpenuhi.

6. PEMETAAN DAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DESA TERTINGGAL DI DESA TALANG SUNGAI BUNGO, KEC. RANTAU PANDAN, KAB. BUNGO**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB bertempat di Kantor Kantor Rio Talang Sungai Bungo.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PPA II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bungo dengan Perangkat Desa Talang Sungai Bungo.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Datuk Rio (Kepala Desa) Bawaihi dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian arahan oleh Kepala Bidang PPA II dan Kepala KPPN Muara Bungo. Arahan yang diberikan yaitu terdapat alokasi dana desa yang cukup besar untuk dilakukan sebesar-besarnya pada kemampuan desa, sehingga jangan sampai ada dana desa yang turun karena semakin banyak dana desa yang diperoleh maka semakin banyak pula masyarakat desa yang sejahtera

Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan perangkat desa terkait identifikasi desa berdasarkan beberapa indeks yang membentuk Indeks Desa Membangun seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kondisi Kemiskinan Desa Tertinggal, didapati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa hal yang menjadi perhatian utama pada Desa Talang Sungai Bungo, adalah mengenai kondisi permukiman masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi oleh seluruh rumah tangga, sanitasi atau jamban yang layak, serta belum adanya tempat pembuangan sampah terpusat. Selain itu, akses jalan menuju desa hanya tersedia satu jalan tanpa alternatif akses lain yang membuat desa sewaktu – waktu dapat terisolasi.
- 2) Dari hasil kunjungan, didapati kebutuhan dari Desa Talang Sungai Bungo antara lain:
 - Pendampingan berupa tenaga penyuluh dalam bidang pertanian sawit karena masyarakat desa mulai beralih mata pencaharian dari pertanian karet ke pertanian sawit
 - Jasa pos/pengiriman barang di desa karena jasa pengiriman tersebut saat ini hanya tersedia di pusat Kabupaten Muara Bungo
 - Jaringan Wi-Fi yang memadai dan listrik yang stabil karena sering terjadi pemadaman seminggu sekali

- Fasilitas pendidikan pada taraf SD, SMP, dan SMA dalam satu atap
 - Dukungan air bersih dan listrik untuk Puskesmas, motor dinas untuk bidan desa, dan *ambulance* desa
- 3) Diperlukan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan LPMP Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, dan PT. Pos Indonesia dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan desa yang belum terpenuhi.

7. DISKUSI TEMUAN LKPD LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI BERSAMA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang P APK Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan melibatkan Kepala Subauditorat Jambi I, Kepala Sub Bagian Humas & TU, dan Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diskusi dilaksanakan untuk membahas persiapan Rapat Koordinasi “Sinergi Mendukung Peningkatan Kualiotas, Akuntabilitas, dan Transparansi LKPD” yang akan dilaksanakan pada Selasa, 7 Maret 2023. Hal ini berkaitan dengan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Diskusi diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang P APK dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 4 klasifikasi status hasil penelaahan tindak lanjut berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, Persentase capaian tindak lanjut selesai per semester II Tahun 2022, serta Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum selesai dilaksanakan.



d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa hal antara lain masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak ada batas deluwaarsa dalam pelaksanaan tindak lanjut. Selain itu, belum dilaksanakan secara tegas sanksi administrasi atau pidana apabila pejabat tidak melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan. BPK berharap dapat bersinergi dengan Kanwil DJPb Provinsi untuk memantau dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan TLRHP. Salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang persentase penyelesaian TLRHP tertinggi saat penyerahan piagam opini WTP.

8. RAPAT KOORDINASI “SINERGI Mendukung Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas, dan Transparansi LKPD**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala Subauditorat Jambi I BPK Perwakilan Provinsi Jambi, dan Perwakilan masing-masing pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Rapat Koordinasi “Sinergi Mendukung Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas, dan Transparansi LKPD” dilaksanakan untuk menambah bekal dan pemahaman kepada pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan serta bahan refleksi dan evaluasi Tindak lanjut Temuan BPK. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempertahankan opini WTP yang telah diraih oleh masing-masing pemerintah daerah.

Kegiatan dibuka oleh MC dan diawali dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Terdapat 2 materi yang disampaikan yaitu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Kepala Subauditorat Jambi I BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan kebijakan akuntansi atas Transaksi TDF Transfer ke Daerah oleh Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kanwil DJPb Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan, didapati bahwa sesuai dengan pemaparan Kepala Subauditorat Jambi I BPK Perwakilan Provinsi Jambi, terdapat 4 klasifikasi status hasil penelaahan tindak lanjut berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yaitu tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Di Provinsi Jambi, persentase penyelesaian tindak lanjut tertinggi sebesar 80,26% yaitu Pemerintah Kabupaten Batanghari. Namun, persentase penyelesaian pemerintah daerah lainnya belum mencapai 80%. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini. Terdapat 3 strategi

peningkatan LKPD yaitu penguatan sistem pengendalian intern (SPI), penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan tindak lanjut.

Terkait kebijakan akuntansi dan proses pencairan TDF belum diatur dalam PMK. Namun, dengan adanya kegiatan ini dapat memberi pengetahuan bagi pemerintah daerah terkait TDF. Pemerintah daerah memberikan saran agar prosedur untuk pencairan dana TDF diharapkan tidak rumit dan apabila PMK yang mengatur terkait TDF telah terbit diharapkan dapat dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah.

9. PEMETAAN DAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DESA TERTINGGAL DI DESA BINTANG MARAK, KEC. BUKIT KERMAN, KAB. KERINCI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB bertempat di Kantor Kantor Kepala Desa Bintang Marak.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PPA II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci dengan Perangkat Desa Bintang Marak.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plt. KPPN Sungai Penuh dan Kepala Seksi PPA II A. Kepala Seksi PPA II A menyampaikan arahan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka melihat kondisi riil Desa Bintang Marak dan mengonfirmasi antara data P3KE milik pemerintah dengan data milik kepala desa untuk menetapkan kebijakan. Kemudian, pemberian arahan juga diberikan oleh DPMD Kabupaten Kerinci dan Bapak Asmar selaku Kepala Desa Bintang Marak.

Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan perangkat desa terkait identifikasi desa berdasarkan beberapa indeks yang membentuk Indeks Desa Membangun seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kondisi Kemiskinan Desa Tertinggal, didapati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa hal yang menjadi perhatian utama pada Desa Bintang Marak, adalah mengenai kondisi permukiman masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi oleh seluruh rumah tangga, sanitasi atau jamban yang layak, serta belum adanya tempat pembuangan sampah terpusat. Selain itu, akses jalan menuju desa hanya tersedia satu jalan tanpa alternatif akses lain yang membuat desa sewaktu – waktu dapat terisolasi.
- 2) Dari hasil kunjungan, didapati kebutuhan dari Desa Bintang Marak antara lain:
 - Fasilitas kesehatan berupa pembangunan Poskesdes serta tenaga kesehatan desa yaitu dokter desa
 - Fasilitas pendidikan taraf SMP yang dekat dengan SD serta tenaga penyuluh pertanian untuk memaksimalkan potensi lahan bagi masyarakat desa
 - Akses internet yang terjangkau serta pengadaan jaringan Wi-Fi untuk desa
 - Pendirian BUMDes karena terdapat beberapa potensi desa yang belum tergarap yaitu potensi pariwisata air terjun air panas dan wisata Gunung Kuniyit berupa hasil perkebunan jeruk dan kayu manis
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bintang Marak diberikan berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat.
- 4) Berdasarkan hasil konfirmasi, data P3KE yang dimiliki oleh pemerintah dengan kondisi riil di Desa Bintang Marak menunjukkan keadaan yang cukup berbeda, beberapa warga yang berada di desil 1 dan 2 terdiri dari warga yang cukup mampu. Selain itu, terdapat beberapa warga yang sudah pindah dari Desa Bintang Marak.
- 5) Diperlukan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan LPMP Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, dan PT. Pos Indonesia dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan desa yang belum terpenuhi.

10. PEMETAAN DAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DESA TERTINGGAL DI DESA DANAU TINGGI, KEC. GUNUNG KERINCI, KAB. KERINCI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB bertempat di Rumah Kepala Desa Danau Tinggi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dari Bidang PPA II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci dengan Perangkat Desa Danau Tinggi.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan diawali dengan sambutan dari DPMD Kabupaten Kerinci dan Kepala Seksi PPA II A. Kepala Seksi PPA II A menyampaikan arahan bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka melihat kondisi riil Desa Danau Tinggi dan mengonfirmasi antara data P3KE milik pemerintah dengan data milik kepala desa untuk menetapkan kebijakan. Kemudian, pemberian informasi dilakukan oleh Bapak Juralis selaku Kepala Desa Danau Tinggi. Beberapa informasi yang diberikan antara lain terdapat 210 KK dengan total penduduk sebanyak 409 jiwa pada Desa Danau Tinggi. Desa Danau Tinggi merupakan produsen sayur-mayur khususnya kentang dan cabai. Tanah perkebunan desa cocok untuk menanam segala jenis sayuran namun tidak cocok untuk buah-buahan

Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan perangkat desa terkait identifikasi desa berdasarkan beberapa indeks yang membentuk Indeks Desa Membangun seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.



d. Hasil yang Dicapai

Setelah dilaksanakan Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kondisi Kemiskinan Desa Tertinggal, didapati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beberapa hal yang menjadi perhatian utama pada Desa Danau Tinggi adalah mengenai Indeks Ketahanan Sosial yaitu tidak adanya tenaga kesehatan di desa, jarak menuju sarana pendidikan (SMP, SMA) serta sarana kesehatan terdekat yang masih cukup jauh, dan terbatasnya akses jalan menuju desa. Selain itu, potensi-potensi yang ada di desa seperti hasil pertanian masih belum dapat dioptimalkan dengan maksimal.
- 2) Dari hasil kunjungan, didapati kebutuhan dari Desa Danau Tinggi antara lain:
 - Fasilitas kesehatan desa antara lain tenaga medis berupa bidan desa atau tenaga kesehatan lainnya dan Posyandu yang layak
 - Fasilitas gedung untuk kegiatan PAUD serta fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA
 - Perbaikan akses jalan desa untuk mendukung kelayakan permukiman
 - Alat pertanian modern (Alsintan), alat irigasi, serta bibit kentang yang selama ini masih dibeli dari Bandung
 - Fasilitas ketahanan lingkungan berupa hewan ternak yang akan dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Danau Tinggi diberikan berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat.
- 4) Berdasarkan hasil konfirmasi, data P3KE yang dimiliki oleh pemerintah dengan kondisi riil di Desa Danau Tinggi, beberapa warga merupakan penerima bantuan lain (PKH dan BPNT).
- 5) Diperlukan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan LPMP Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jambi, dan PT. Pos Indonesia dalam memenuhi dan kebutuhan desa yang belum terpenuhi.

PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

1. MENERIMA KUNJUNGAN GUBERNUR JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi oleh para kepala bidang dan Gubernur Jambi didampingi pegawai pada BPKPD Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Pertemuan bertempat di ruang kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut, beberapa hal yang dibahas baik Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief Economist* dan Gubernur Jambi sebagai kepala daerah, maupun Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Financial Advisor*/Pembina Pengelolaan Keuangan dan Gubernur Jambi sebagai pimpinan pemerintah daerah yang mengelola APBD.



d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil paparan dan diskusi pada acara tersebut, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) DJPb sebagai perwakilan Kemenkeu di Jambi, siap memberikan dukungan pada kinerja Pemda, dalam akselerasi belanja dan pendapatan daerah.
- 2) Dalam menjalankan peran tersebut, maka akan mengefektifkan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) untuk menjadi media komunikasi koordinasi antar-berbagai lini terkait. Gubernur berkenan memberikan dukungan dalam bentuk *Legal Formal*.
- 3) Dukungan untuk peningkatan kompetensi dengan *Sharing Session* tata kelola APBD agar bisa saling memahami antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.
- 4) Rencana penyerahan Piagam WTP, ke depannya akan disentralisasi di Provinsi (masih akan dilakukan di Triwulan IV)

2. KUNJUNGAN KE BPKP PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Februari 2023 bertempat di Kantor BPKP Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kunjungan dan diskusi melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PAPK dan Kepala Bidang PPA II dengan Kepala BPKP Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Beberapa hal yang didiskusikan pada kegiatan tersebut adalah peningkatan tata kelola APBD, baik secara pelaksanaan maupun pelaporan. Selain itu, beberapa isu strategis nasional yang memerlukan hubungan pemerintah pusat-daerah seperti stunting didiskusikan pada kesempatan tersebut.



d. Hasil yang Dicapai

Kegiatan tersebut menghasilkan simpulan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kerja sama Kanwil DJPb dengan BPKP terkait *transfer knowledge* pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mendukung peran *Financial Advisor*
- 2) Dalam rangka peningkatan kualitas data ALCo Regional, disepakati kerja sama penggunaan aplikasi SIMDA agar Kanwil dapat turut memonitor pelaksanaan APBD

3. KOORDINASI PENGELOLAAN ASET DENGAN KAKANWIL DJKN SJB DAN SEKDA PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 bertempat di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Dalam diskusi tersebut, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bagian Umum, Kepala Kanwil DJKN SJB didampingi Kepala

KPKNL Jambi dan Kepala Bidang Penilaian, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jambi didampingi Kepala BPKPD Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan *update* realisasi TKD pada Provinsi Jambi dan isu terkini hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Kanwil DJPb Jambi berencana akan melaksanakan FGD dengan pemerintah daerah membahas *Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)*. Sekretaris Daerah dan Kakanwil DJPb Provinsi Jambi berkomitmen mendukung tata kelola APBD dan aset negara/daerah yang semakin baik.



d. Hasil yang Dicapai

Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara rutin mengirimkan realisasi penyaluran TKD bulanan kepada Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

4. MENERIMA KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN BI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2023 bertempat di Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Dalam diskusi tersebut, dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA II serta Kepala Perwakilan BI Jambi didampingi Deputi Perwakilan BI Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Jambi mengapresiasi kerja sama baik yang selama ini terjalin antara kedua instansi. Selain itu, diharapkan juga koordinasi dapat terus ditingkatkan sehingga masing-masing instansi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya semakin optimal.

Kedua pimpinan menyepakati pertukaran informasi/data yang diperlukan oleh masing-masing instansi untuk keperluan tugas.



d. Hasil yang Dicapai

Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait informasi/data dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

5. RAPAT KERJA DAERAH TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Hotel ASTON Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala BKKBN Provinsi Jambi, Kepala BPKP Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BULOG

Jambi, Kepala BPOM Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Kemenag, serta kepala daerah dan kepala dinas terkait.

c. Rincian Kegiatan

Beberapa hal yang didiskusikan pada kegiatan tersebut adalah: Data Keluarga Berisiko Stunting Hasil Verifikasi dan Validasi Tahun 2022; Refleksi Pelaksanaan Koordinasi & Sinkronisasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2022; Praktik Baik Pelaksanaan Stunting di Kabupaten Merangin; Best Practice Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Peningkatan Sinergitas Dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Menuju Jambi Mantap 2024, dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan dukungan APBN dalam percepatan penurunan stunting, baik melalui belanja K/L maupun TKD. Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai anggota TPPS juga berkomitmen mendukung upaya penurunan stunting di Provinsi Jambi. Di akhir kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada BKKBN Provinsi Jambi atas beberapa capaian baik pelaksanaan APBN tahun 2022.



d. Hasil yang Dicapai

Berkaitan dengan pelaksanaan Rakerda, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta para mitra dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
- 2) Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi selaku Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting telah dan akan terus berupaya untuk melakukan kolaborasi untuk konvergensi lintas program dan sektor dengan menggandeng semua pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix*. Hasilnya, Data SSGI tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Provinsi Jambi dari 22.4 persen di tahun 2021 menjadi 18 persen di tahun 2022.

- 3) Dalam penanganan stunting, keluarga merupakan komponen utama yang sangat berperan dalam pencegahan maupun penanggulangannya. Kita semua mengharapkan melalui keluarga dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju, dengan harapan bersama bahwa penanganan sumber daya manusia adalah tugas kita bersama. Dalam penurunan stunting, selain terfokus pada ibu hamil dan balita, kita juga harus mencegah stunting dari hulu dengan menyiapkan remaja putri calon pengantin/calon ibu yang akan memasuki persiapan kehidupan berkeluarga dan kita harus memastikan setiap remaja putri calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan.
- 4) Stunting merupakan masalah gizi kronis sehingga dapat dicegah jika ditangani dengan tepat dan cepat. Pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting. Sebelas Intervensi spesifik stunting difokuskan pada 1000 HPK yaitu: Skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil kurang energi kronis (KEK), Pemantauan pertumbuhan balita, ASI Eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi Balita, tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja, ibu hamil dan keluarga termasuk pemecuan bebas buang air besar sembarangan (BABS).

6. KUNJUNGAN KE KEPALA BPS PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Maret 2023 bertempat di Kantor BPS Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA II dengan Kepala BPS Provinsi Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa tantangan mempertahankan pertumbuhan perekonomian akan sulit dilakukan bila masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Penguatan kolaborasi dan sinergi harus diperluas dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat baik dari instansi vertikal pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan instansi/lembaga lainnya. Intervensi kebijakan yang tepat dan selaras dari para pihak terlibat diyakini dapat membantu melalui tantangan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan BPS Provinsi Jambi berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan data, analisis, dan publikasinya. Dengan pertemuan tersebut, kedua pihak berharap dapat memberi kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi.

7. KUNJUNGAN KE KEPALA OJK JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Kantor OJK Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Seksi PPA II B dengan Kepala OJK Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Salah satu komitmen yang dibangun oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam upayanya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional adalah dengan menjalin sinergi dan koordinasi dengan mitra kerja strategis, salah satunya adalah Kantor OJK Jambi.

Sinergi tersebut diwujudkan dalam komitmen pertukaran data serta peran aktif OJK Jambi dalam FGD pada rangkaian penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) oleh Kanwil DJPb Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Kedua instansi berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

8. KUNJUNGAN KE WALIKOTA JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Maret 2023 bertempat di Kantor Bappeda Kota Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PAPK dan Kepala Seksi PPA II B dengan Walikota Jambi didampingi Kepala Bakeuda dan Kepala Bidang Akuntansi.

c. Rincian Kegiatan

Meningkatkan harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mewujudkan peran *Financial Advisor* bagi pemerintah daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan *sharing session* dan diskusi dengan Walikota Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengapresiasi rasio kemandirian fiskal APBD Kota Jambi yang semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid berlangsung.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Jambi menyampaikan apresiasi terhadap Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang memiliki "teropong" yang jeli dalam menganalisis keuangan pemerintah daerah dan memberikan masukan bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.



d. Hasil yang Dicapai

Walikota Jambi berharap, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat secara rutin memperbarui informasi pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Kota Jambi.

9. *HIGH LEVEL MEETING* TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, lantai 2 dengan mengusung tema Optimalisasi Digitalisasi dan Kerjasama Antar Daerah Menuju Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diantaranya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kepala OJK Jambi, Kepala BPS Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, serta para sekretaris daerah, kepala dinas, dan anggota TPID setiap kabupaten/kota. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten Deputi Fiskal Kemenko Perekonomian.

c. Rincian Kegiatan

Kegiatan HLM TPID Provinsi Jambi tahun 2023 diselaraskan dengan TP2DD untuk perumusan rencana aksi yang lebih komprehensif. Kegiatan tersebut salah satunya menyoroti catatan inflasi Provinsi Jambi yang pernah menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi sebagai refleksi dan evaluasi. Kemudian, disoroti pula bagaimana Provinsi Jambi mampu menjaga tingkat inflasinya sekarang.

Gubernur Jambi menyampaikan bahwa kegiatan HLM TPID dan TP2DD ini merupakan upaya strategis untuk mengendalikan harga pangan strategis di Provinsi Jambi khususnya pada hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan evaluasi penggunaan SP2D Online pemerintah daerah (Kanal 7020). BPD Jambi telah terverifikasi untuk dapat mendukung penerapan SP2D Online, tetapi belum ada pemerintah daerah yang menerapkan. Selain itu, beliau juga menyampaikan dukungan APBN dalam menjaga stabilitas perekonomian dan upaya pemerintah menjaga tingkat inflasi.



d. Hasil yang Dicapai

Dari hasil paparan dan diskusi pada acara tersebut, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) TPID se-Provinsi Jambi melakukan pemantuan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan strategis di semua wilayah Provinsi Jambi khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H.
- 2) Mereviu kembali akurasi dan kelengkapan data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.
- 3) Melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
- 4) Mengadakan *capacity building* kepada enumerator se-Provinsi Jambi untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap survei harga di pasar.
- 5) Memanfaatkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan sinergi pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), antara lain dengan menggiatkan gerakan budidaya cabai, pasar murah, dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
- 7) Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

10. KUNJUNGAN KE KAPOLDA JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Maret 2023 bertempat di Mapolda Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA I dan Kepala Bidang PAPK dengan Kapolda Jambi didampingi Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

c. Rincian Kegiatan

Dalam diskusi tersebut, kedua pimpinan instansi di Provinsi Jambi sepakat bahwa komunikasi yang baik merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan kinerja dan keuangan satuan kerja yang saling berkaitan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan evaluasi dan *progress* pelaksanaan anggaran yang tercermin pada IKPA satker lingkup Polda Jambi, termasuk unit Badan Layanan Umum (BLU) RS Bhayangkara Jambi. Beliau juga memberi apresiasi atas kualitas LK Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) tahun 2022 yang disusun dan disampaikan kepada Kanwil DJPb Provinsi Jambi oleh Bidkeu Polda Jambi.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, kedua pimpinan juga sepakat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Dukungan APBN diberikan kepada Kepolisian untuk terciptanya pelaksanaan Pemilu yang tertib dan aman.



d. Hasil yang Dicapai

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa hal, diantaranya:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Polda Jambi meningkatkan koordinasi dan komunikasi demi pelaksanaan APBN yang semakin baik dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian
- 2) Satker BLU RS Bhayangkara berkomitmen menjalankan *best practices* BLU

11. KUNJUNGAN KE KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PPA I dengan Ketua Pengadilan Tinggi didampingi Kepala Kepala Bagian Perencanaan serta Kepala Subbagian Keuangan.

c. Rincian Kegiatan

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengevaluasi dan memberi apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Jambi atas capaian maksimal pada beberapa indikator dalam IKPA periode Tahun 2022. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan Anggaran agar IKPA maksimal.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sepakat untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga Pengadilan Tinggi Jambi dapat melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan APBN menjadi semakin baik.

**d. Hasil yang Dicapai**

Komitmen Kanwil DJPb dalam menjalankan peran *Financial Advisor* tersebut diimplementasikan dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Satker Pengadilan Tinggi yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi serta akan melibatkan KPPN untuk mendukung peran *Financial Advisor*.

12. FORUM EKONOMI DAN BISNIS JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir anggota Komisi-6 DPR RI Bapak Ihsan Yunus, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Kepala BULOG Jambi, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi, para kepala dinas terkait, dan para pimpinan perbankan.

c. Rincian Kegiatan

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BI Jambi, Bapak Hermanto menyampaikan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun 2023 meskipun mulai tumbuh melambat pada triwulan I 2023. Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Provinsi Jambi diprediksi tumbuh melambat pada rentang 3,70%-4,50%, ditopang perbaikan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal. Ketua ISEI Cabang Jambi Bapak Syaparuddin menambahkan terkait pengendalian inflasi, solusi yang bisa dilakukan yakni memetakan terlebih dahulu akar permasalahan pemicu inflasi. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa diperlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengendalikan tingkal inflasi, contohnya kenaikan harga daging yang tinggi saat hari besar keagamaan karena ketersediaan barang sedikit dapat diatasi dengan perubahan *mindset* peternak di Jambi yang hanya menjadikan ternak sapi atau kerbau sebagai investasi atau tabungan menjadi sebagai bisnis.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan peran APBN sebagai “*shock absorber*” di masa pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, Beliau juga menyampaikan realisasi dan beberapa output APBN tahun 2022 yang mengambil peran dalam memantik pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi serta beberapa kebijakan Kementerian Keuangan dalam menciptakan atmosfer yang mendukung aktivitas UMKM. Beliau mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi lainnya untuk berupaya memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Di penghujung acara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada BI Jambi atas sinergi dan kolaborasi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Jambi.



d. Hasil yang Dicapai

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan ada sinergi dan keberlanjutan langkah strategis dari setiap instansi dan berbagai sektor yang dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

13. KUNJUNGAN KE BPK PROVINSI JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2023 bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang PAPK dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi didampingi Kepala Sekretariat, Kepala Subbag Keuangan, dan Kepala Subbag Kehumasan.

c. Rincian Kegiatan

Mendukung penguatan harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2022 merupakan poin penting dan krusial dalam pengelolaan APBN dan APBD yang pelaksanaannya secara perlahan telah diterapkan di tahun 2023 dan secara penuh akan diterapkan

pada tahun 2024. Kegiatan tersebut sebagai salah satu wujud penguatan peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief Economist* di Provinsi Jambi.

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai *Financial Advisor* (FA) bagi para *stakeholder*, dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga membahas dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran satker BPK Provinsi Jambi. Di akhir kunjungan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberi apresiasi kepada Perwakilan BPK Provinsi Jambi atas capaian beberapa indikator yang memperoleh nilai sempurna pada IKPA satker BPK Provinsi Jambi tahun 2022.



d. Hasil yang Dicapai

Penguatan koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jambi baik dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan dalam rangka pengelolaan anggaran satker BPK Provinsi Jambi.

14. KUNJUNGAN KE KOMANDAN KOREM 042 GARUDA PUTIH JAMBI

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Maret 2023 bertempat di Markas Korem 042 Garuda Putih Jambi.

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi didampingi Kepala Bidang Pembinaan

Pelaksanaan Anggaran I dengan Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi didampingi oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Keuangan.

c. Rincian Kegiatan

Pelaksanaan peran Financial Advisor dengan mendiskusikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker Korem 042 Garuda Putih. Dalam pelaksanaan anggarannya, Korem 042 Garuda Putih telah berpedoman pada IKPA sehingga kegiatan tugas dan fungsinya dapat lebih optimal dengan dukungan APBN.

Selain itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai pembina BLU di daerah juga mendiskusikan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi bagian dari Bagian Anggaran 012 Kementerian Pertahanan di Provinsi Jambi, yaitu Satker Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi. Danrem 042 Garuda Putih selaku Ketua Dewan Pengawas BLU RS dr. Bratanata Jambi menyampaikan bahwa semangat meningkatkan pengelolaan BLU akan membawa dampak baik yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Di akhir pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Danrem atas capaian Korem 042 Gapu dalam meraih peringkat terbaik kedua penilaian IKPA kategori satker dengan pagu besar (>Rp40 M) tahun 2022. Diharapkan, capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.



d. Hasil yang Dicapai

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa hal, di antaranya:

- 1) Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan Korem 042 Garuda Putih Jambi meningkatkan koordinasi dan komunikasi demi pelaksanaan APBN yang semakin baik dan mendukung pelaksanaan tugas TNI
- 2) Danrem selaku ketua dewan BLU RS Bratanata Jambi berkomitmen mendukung pelaksanaan best practices BLU RS Bratanata dengan koordinasi yang baik dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai Pembina BLU



FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

PELAKSANAAN KEGIATAN LOCAL EXPERT

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

PELAKSANAAN KEGIATAN LOCAL EXPERT**TALKSHOW APBN: KINERJA BAIK APBN 2022 MEMPERKUAT OPTIMISME DAN KEWASPADAAN DI TAHUN 2023****a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 pukul 08.30 s.d. 10.00 WIB bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan dilaksanakan secara *hybrid* sera disiarkan secara langsung melalui kanal *Youtube* Kanwil DJPb Provinsi Jambi

b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, seluruh pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, dan awak media.

c. Rincian Kegiatan

Talkshow dibuka dengan sambutan dari Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan pelaksanaan APBN pada tahun 2023 diarahkan antara lain untuk belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, APBN juga diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan Kinerja Pelaksanaan APBN oleh masing-masing perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi yang dimoderatori oleh Bapak Tri Djoko Yulianto.





d. Hasil yang Dicapai

Setelah diselenggarakan *Talkshow* APBN, didapati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pergerakan perekonomian di akhir tahun 2022 yang semakin intens ditandai dengan tingkat inflasi sebesar 0,77% mtm (6,35% yoy), tumbuh dibandingkan dengan periode November 2022. Selain itu, surplus neraca perdagangan di penghujung tahun 2022 hampir menyentuh US\$1.000,00 juta (ekspor US\$1.320,29 juta; impor US\$33,97 juta). Hal tersebut menandakan stabilitas perekonomian di Provinsi Jambi di tengah volatilitas global.
- 2) Realisasi pendapatan negara mencapai Rp7.520.59 miliar (115,56% dari target yang tercantum dalam Perpres 98/2022) atau tumbuh 14,36% dibandingkan realisasi tahun 2021. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp6.307,71 miliar (117,4% dari Perpres 98 tahun 2022) atau tumbuh 19,5% dari realisasi tahun 2021. Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp368.56 miliar (196,4% dari Perpres 98/2022), atau meningkat 64,5% dibandingkan realisasi tahun 2021. Capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan ekspor.
- 3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp774,17 miliar atau 139,15% sesuai Perpres 98/2022. Capaian tersebut meningkat 6,69% dibandingkan realisasi tahun 2021. Namun secara keseluruhan kenaikannya tidak lebih tinggi dari pada kenaikan pada bulan November 2022.
- 4) Realisasi belanja negara mencapai Rp21.161,37 miliar atau meningkat 0,67% dari realisasi tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang

berperan sebagai *shock absorber*. Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 104% dari Perpres 98/2022.

- 5) APBN Tahun 2023 dirancang untuk menahan guncangan ketidakpastian global, mengantisipasi dan memitigasi risiko, serta menjaga momentum pemulihan dan mendukung transformasi energi. Hal tersebut diterjemahkan dengan strategi Optimalisasi Pendapatan Negara dengan memperhitungkan risiko moderasi harga komoditas dengan Belanja Negara yang mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai *shock absorber* menghadapi ketidakpastian.
- 6) Kebijakan pelaksanaan APBN 2023:
 - a. Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif;
 - b. Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hujau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;
 - c. Memperkuat jarring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan kesenjangan;
 - d. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah;
 - e. Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan persiapan Pemilu 2024.
- 7) Beberapa awak media telah mengamplifikasi kegiatan dan/atau substansi kegiatan pada *platform* pemberitaan masing-masing antara lain RRI Jambi, Jambi Ekspres, TVRI Jambi, serta *website* dan media sosial Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

FKPKN TRIWULAN I TAHUN 2023

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**KANWIL DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI**

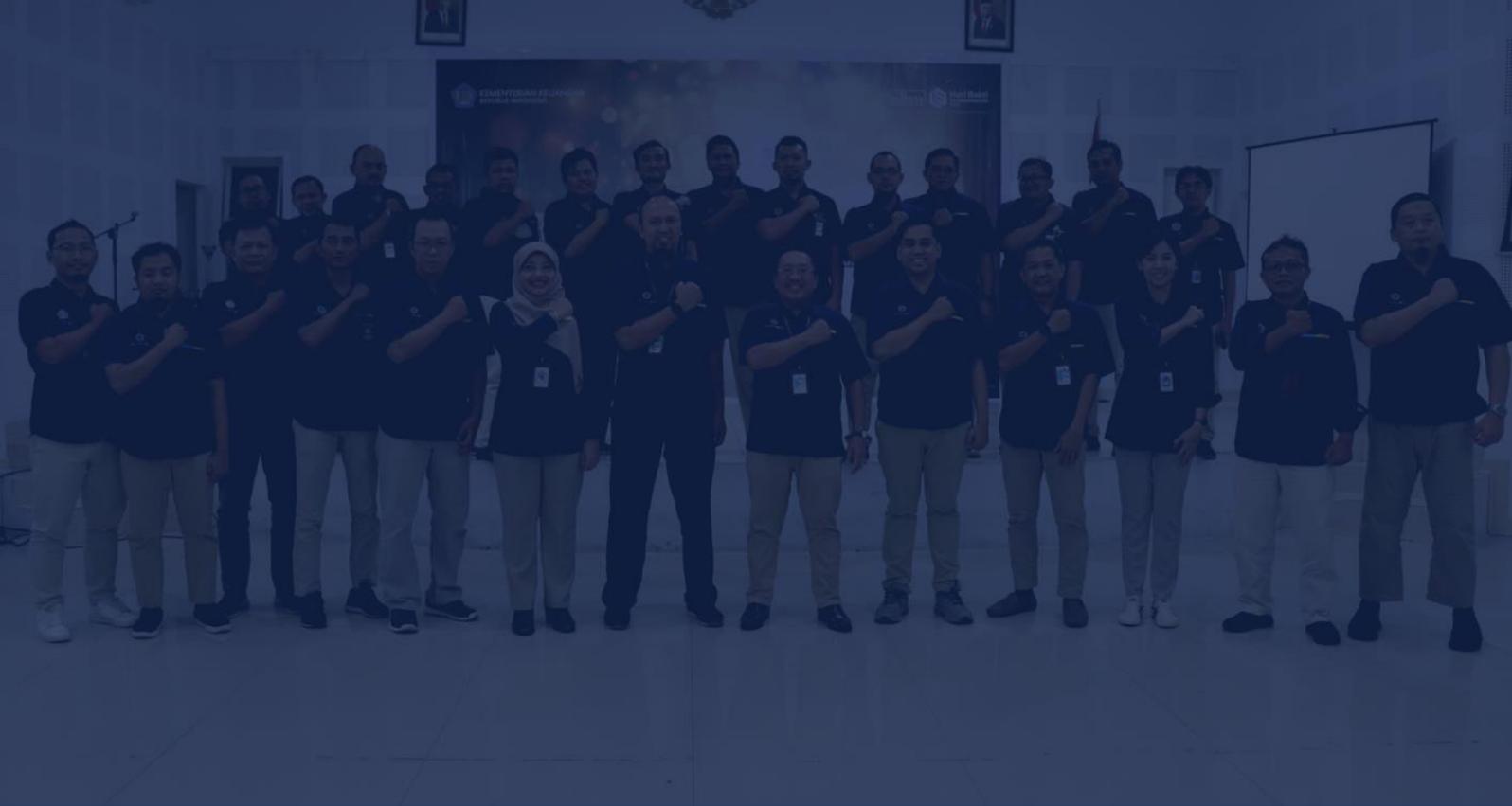
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD, dan TKD, telah dilaksanakan edukasi terhadap Satuan Kerja maupun OPD terkait secara berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, dan rapat koordinasi baik dari sisi perencanaan hingga pelaporan keuangan negara mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis terutama pada awal tahun anggaran
2. Guna meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Jambi secara aktif melibatkan KPPN pada lingkup wilayahnya dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka penyelesaian *To Do List* untuk menyelesaikan permasalahan pada satuan kerja
3. Demi mendukung pemberdayaan serta penguatan peran UMKM terhadap perekonomian Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi berkolaborasi dengan seluruh Kemenkeu Satu, Perbankan, LKBB, Perum Bulog, dan Mata Garuda menyelenggarakan Pekan UMKM Kemenkeu Satu yang diikuti oleh 20 UMKM binaan serta diadakannya *talkshow* untuk menyampaikan materi sosialisasi mengenai pembinaan UMKM secara interaktif kepada masyarakat, pengunjung, maupun pelaku UMKM
4. Dalam rangka mendukung salah satu peran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, telah dilaksanakan kegiatan pemetaan dan analisis kondisi kemiskinan desa tertinggal kepada 4 desa tertinggal di Provinsi Jambi guna mengetahui kondisi desa secara lengkap dan memastikan pelaksanaan percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan baik dengan melibatkan KPPN dan Pemerintah Daerah serta perangkat desa
5. ALCo atau *Asset and Liabilities Committee* Regional merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo di tingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat regional seperti informasi terkait APBN, APBD, Perpajakan, Bea Cukai dan Kekayaan Negara lingkup wilayah Provinsi Jambi yang menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi
6. Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pimpinan daerah, dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan negara di wilayah Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah mensinergikan FKPKN dengan TPID, TP2DD, TPPS, dan berpartisipasi dalam keterlibatan berbagai forum di daerah seperti Forum Ekonomi dan Bisnis Jambi. Di samping itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga melaksanakan kunjungan serta koordinasi dengan pimpinan daerah dalam wilayah Provinsi Jambi.

REKOMENDASI

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara rutin triwulanan. Monitoring berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh satker untuk akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi agar segera dapat diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara daring agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti kegiatan dengan fleksibel dan tidak terbatas pada satuan kerja vertikal tetapi pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah
2. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ALCo Regional baik Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, *local expert* dan instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sehingga ALCo Regional yang disusun menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi
3. Membangun dan meningkatkan komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD termasuk dana TKD. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, baik Kanwil DJPb dan Pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pertukaran data untuk kepentingan analisis yang berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara
4. Membangun komunikasi dengan satker pusat yang berada di wilayah Jambi. Hal ini bertujuan agar Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan optimalisasi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) satker. Bagi satker, hal ini perlu karena bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan nilai IKPA
5. Melaksanakan fungsi *Financial Advisor* secara lebih intens dengan Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan penyaluran TKD. Semenjak tahun 2023 terdapat perubahan penyaluran yang semula, penyaluran hanya beberapa komponen TKD saja menjadi seluruh komponen TKD disalurkan melalui KPPN daerah. Terdapat juga perubahan terkait komponen DAU, yang sebelumnya bersifat *block grant*, berubah menjadi *block grant* dan *specific grant*. Sebagian besar penyaluran berdasarkan rekomendasi dari kantor pusat, sehingga sangat penting bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam meningkatkan komunikasi dengan Pemda supaya penyaluran TKD berjalan dengan lancar



Kanwil Ditjen Perbendaharaan *Provinsi Jambi*

Jl. M. Yoesoef Singadikane No. 45, Telanaipura, Kota Jambi, 36122

Telp. (0741) - 668802 | Fax. (0741) - 668801

Email: kanwil.jambi@gmail.com

Website: djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi

